

Edisi 34 ■ Rp 17.500 Luar Jabotabek Rp 18.250

TokohINDONESIA®

THE EXCELLENT BIOGRAPHY

SOKSI
PENCETAK
KADER
BANGSA

PERLU
REFORMASI
JILID
DUA

MENUJU
INDONESIA
RAYA
2045

YAKIN
HIDUP
100
TAHUN



Suhardiman

FUTUROLOG POLITIK INDONESIA



TokohINDONESIA.com

THE JOURNALISTIC BIOGRAPHY



MAJALAH
BERBASIS WEB SITE

www.tokohindonesia.com

www.ensikopedi.com


Asasira
PERSEROAN TERBATAS

DECISION MAKERS NEWS

GEDUNG DEWAN PERS LANTAI 1, JALAN KEBON SIRIH 32-34, JAKARTA PUSAT 10110

■ Tel: (021) 34 830 840 - 3219 5351 - 3219 5352 - 3219 5353 ■ In Headnews, Pracetak & Sirkulasi:

Jalan Bukit Duri Tanjakam IX No 26, Tebet, Jakarta Selatan 12840 ■ Tel: (021) 8370 1736 ■ Fax: (021) 8378 7235

■ E-mail: redaksi@tokoh.net & info@tokoh.net ■ URL: www.tokohindonesia.com



TOKOH UTAMA:

PROF DR SUHARDIMAN, SE, FUTUROLOG POLITIK INDONESIA: Pendiri satu-satunya dan Ketua Dewan Penasihat SOKSI (Sentral Karyawan Swadiri Indonesia), ini kami juluki futuris politik Indonesia. Personifikasi SOKSI ini juga seorang tokoh pencetak kader bangsa. Mantan Wakil Ketua DPA-RI (1993-1998) kelahiran Gawok, Solo, 16 Desember 1924, yang juga dijuluki dukun politik, itu memiliki kecerdasan dan ketajaman intuisi, insting (indera keenam) memprediksi perkembangan politik Indonesia jauh ke depan. 6

- **Tolak Carik Desa Jadi Dukun Politik**
Ayahnya yang menjabat kepala desa bercita-cita menempa Suhardiman menjadi juru tulis atau carik desa. Suhardiman menolaknya karena ingin melanjutkan sekolah. Dia pun menjadi tentara dan lulus Akademi Militer tahun 1949. Namun, dalam karir, dia banyak bergumul dalam dunia politik. Intuisi politiknya sangat peka dan menjangkau jauh ke depan, sehingga dia digelar dukun politik. 8
- **Kehidupan Keluarga** 13

■ **Yakin Hidup 100 Tahun**
Entah kenapa tiba-tiba Prof Dr Suhardiman merasa didatangi seorang malaikat pencabut nyawa. Malaikat itu ngomong kepadanya bahwa kedatangannya sebenarnya untuk mencabut nyawanya. Tapi mendadak ada perintah supaya ditunda. Pertimbangannya, "karena kamu masih dibutuhkan oleh bangsa dan negaramu di sana," ujar Suhardiman menirukan kata-kata sang malaikat. Ditunda berapa lama? Seratus tahun? "Jadi umur saya nanti seratus lebih, ha-ha-ha...!" katawanya berderai. 14

PERSPEKTIF:

- **Etos Nasionalisme Baru**
Prof Suhardiman seorang nasionalis sejati. Pada usia senjanya, sudah menginjak 82 tahun, pria kelahiran Solo ini tidak pernah berhenti berpikir untuk kemajuan bangsanya. 18
- **Regenerasi Kepemimpinan Bangsa**
Prof Suhardiman memaparkan pemikirannya bahwa proses regenerasi di dalam pembangunan politik dapat dibagi dalam empat kurun waktu. 20



Menuju Indonesia Raya Ketiga 2045
Eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sangat perlu dipahami di antara sepek terjang ideologi-ideologi besar dunia. Pemahaman ini sangat penting dalam rangka pemantapan ideologi Pancasila yang menjadi dasar dan pedoman hidup bangsa. 24

- **Analisis Suhardiman Tentang Teokrasi, Individualisme, Kapitalisme dan Sosialisme** ... 28

WAWANCARA:

■ **Suhardiman: Perlu Reformasi Jilid Dua**
DR Suhardiman pendiri Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sering disebut sebagai dukun politik. Hal ini terutama dikaitkan dengan seringnya dia membuat gejer dengan ramalan-ramalan politiknya yang kemudian terbukti terjadi. 30

DEPTHNEWS:

- **SOKSI Pencetak Kader Bangsa**
SOKSI, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) pencetak kader bangsa, bukan kader organisasi. 36
- **Dinamika Perjuangan SOKSI** . 38
- **Faham Organisasi** 40
- **Asas, Tujuan & Tugas SOKSI** . 40
- **Dewan Penasihat SOKSI** 40
- **Depinas SOKSI** 41
- **Panca Dharma Karyawan** 42
- **Mars Karyawan Indonesia** 42

INHEADNEWS:

■ **Pernyataan Politik SOKSI**
Prihatin Atas Munculnya Fenomena Phobia Pancasila 4

KAPUR SIRIH:

■ **Politisi Negarawan** 4

COVER: Esero Design
FOTO: MTI/ricky I photo studio



■ **MAJALAH TOKOH INDONESIA**, Majalah biografi pertama di Indonesia ■ **Edisi Cetak:** PLASA WEB **WWW.TOKOHINDONESIA.COM**
- ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA ■ **SERTIFIKAT MEREK:** Ditjen HAKI, Departemen Hukum dan HAM Agno: D00-02-2395 ■ **ISSN:** 1908-9788
■ **PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI:** Ch Robin Simanullang ■ **REDAKTUR EKSEKUTIF:** Mangatur Lorielcide Paniroy ■ **SENIOR WRITER:** H Syahbuddin Hamzah ■ **SEKRETARIS REDAKSI:** Marjuka Situmorang ■ **SIDANG REDAKSI:** Hapusan Tampubolon, Anis Fuadi, Samsuri, Tian Son Lang, Suryo Pranoto, Retno Handayani, Dandy Hendrias, Henry Maruwas, Tumpal Siburian ■ **KONTRIBUTOR:** Heru B Utomo, Saut Situmorang, Yoeliani Desianna Somali, Yusak HS, Yayat Suryatna, Tahi Purba (Medan), Benhard Sihite (Purwakarta), SL Pohan, Semmy Balgi (Kaltim), Richard Susilo (Tokyo) ■ **FOTOGRAFER:** Ricky L Photo Studio, Wilson Edward ■ **TATA GRAFIS:** ESERO Design ■ **LIPUTAN, RISET DAN PUSAT DATA:** In Headnews (The Indonesia Headnews) ■ **PEMIMPIN PERUSAHAAN:** Mangatur L Paniroy ■ **MANAJER KEUANGAN:** Adur Nursinta Purba ■ **SEKRETARIS:** Herni Dewi Farida ■ **IKLAN:** Doan Adikara Pudan ■ **DISTRIBUSI:** Hotsan BS, Kedarton Harijanja ■ **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:** Jalan Bukit Duri Tanjakan IX No26, Tebet, Jakarta 12840 ■ Po Box 4042 JKTJ 13040 ■ **TELEPON** (021) 83701736 - 9101871 - 70930474 ■ **FAX:** (021) 9101871 ■ **SMS** 0812-949-1043 ■ **E-MAIL:** redaksi@tokohindonesia.com - iklan@tokohindonesia.com - sirkulasi@tokohindonesia.com ■ **WEBSITE:** www.tokohindonesia.com - www.tokohindonesia.co.id - www.tokohnasional.com - www.ensiklopedi.com - www.tokoh.net - www.e-ti.com - www.indonesianfamous.com ■ **WEB MAINTENANCE:** cv Esero Teknologi Informasi ■ **PERCETAKAN:** pt Gramedia ■ **PENERBIT:** pt Citraprinsip Publisitas Indoaprint ■ **REKENING:** Bank Niaga Supomo Jakarta No.025.01.24000.00.8 ■ **TARIF IKLAN:** Cover Rp20.000.000, Isi Rp12.500.000/halaman ■ **HARGA:** Rp17.500 (Luar Jabotabek Rp18.500) ■ **Langganan** Rp160.000 (12 Edisi).

Politisi Negarawan

Pembaca! Pada saat majalah ini menjelang naik cetak, seorang politisi yang kami anggap tulus dan jujur menyatakan keprihatinan atas perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Bukannya menjadikan demokrasi itu untuk kepentingan bangsa, tapi malah untuk saling menjatuhkan. Padahal, tuturnya, para pendiri negara ini telah memberi landasan dan pelajaran mengenai demokrasi yang semestinya dilakukan.

Keprihatinan senada juga telah disampaikan beberapa politisi berjiwa negarawan lainnya. Satu di antaranya adalah politisi senior Prof Dr Suhardiman, SE. Dia mengeluhkan, terancamnya jati diri Indonesia saat ini. Reformasi yang berlangsung sejak 1988, dalam pengamatannya, belum menampakkan jati diri dan arah tujuan Indonesia masa depan. Sistem dan struktur politik masih harus ditata supaya lebih jelas dan terarah. Hal ini justru diakibatkan amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh para politisi yang mementingkan golongannya sendiri. Maka dia melihat perlunya reformasi jilid dua (reformasi budaya) untuk lebih mempertegas jati diri dan tujuan masa depan Indonesia.

Keprihatinan Suhardiman juga tercermin dalam Pernyataan Politik SOKSI hasil Rapimnas 20-21 Agustus 2006 lalu. Substansi pernyataan politik SOKSI itu juga berulang kali dikemukakannya saat wawancara dengan wartawan Tokoh Indonesia DotCom. Tampaknya, Suhardiman sangat gundah melihat perkembangan politik (demokrasi) di negeri ini.

Tampaknya, dia sangat ingin hidup lebih muda lagi, untuk kiranya bisa ikut berperan dalam politik praktis, terutama dalam proses pengambilan keputusan (kebijakan) demi kemakmuran rakyat dan kejayaan negara yang sangat dicintainya.

Tapi, setinggi apa pun semangat juang kenegarawannya, usia tetap saja tidak bisa dihambat. Tepat Sabtu, 16 Desember 2006, dia sudah genap berusia 82 tahun. Usia yang terbilang lanjut, jauh di atas usia rata-rata Indonesia. Namun tampilan pisik apalagi semangat juangnya masih sangat tinggi. Dia bahkan yakin akan berusia lebih seratus tahun. Dan, dia tidak ingin menghabiskan usia lanjutnya itu dengan hal yang sia-sia. Dia selalu ingin mengabdikan kepada bangsa dan negaranya sampai akhir hayatnya.

Dalam percakapan lepas kami, seseorang mengatakan, Suhardiman rasanya terlalu cepat lahir (Solo, 16 Desember 1924), sehingga dia harus berhadapan dengan Soeharto yang lebih 30 tahun tidak berkenan matahari lain bersinar selain dirinya sendiri.

Jika direnungkan, ucapan lepas (guyonan) ini justru sangat bermakna. Bukankah Suhardiman seorang politisi negarawan yang amat hebat pada zamannya? Dalam usia masih relatif muda, dia mendirikan dan memimpin SOKSI yang kemudian menjadi salah satu pilar pendiri Golongan Karya yang menopang kekuasaan selama tiga dasawarsa. Dia juga gemilang memimpin proses legislasi lima undang-undang bidang politik di DPR. Tapi, dia tak sekalipun diangkat dalam posisi strategis di pemerintahan. Jabatan paling tinggi hanyalah Wakil Ketua DPA, yang pada era reformasi ini sudah dibubarkan. Tapi biar pun punya kapasitas dan kompetensi, dia tak pernah memaksakan kehendak, apalagi ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Barangkali, seandainya matahari yang ada dalam dirinya diberi kesempatan bersinar dalam jabatan strategis pemerintahan, Suhardiman mungkin akan menjadi saingan terberat Pak Harto. Bahkan jika dia masih dalam usia limapuluh tahun hari ini, mungkin dia lebih patut jadi presiden. Demikianlah Pembaca, maka kami menyajikan profil dan pemikirannya pada edisi ini. Selamat membaca!

Redaksi

Pernyataan

Prihatin Atas Munculnya

SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) menyuarakan beberapa keprihatinan dalam tujuh poin pernyataan politiknya pada Rapat Pimpinan Nasional I SOKSI tanggal 20-21 Agustus 2006. Antara lain menyatakan: Prihatin atas munculnya fenomena phobia terhadap Pancasila; Praktik pelaksanaan UUD 1945 setelah mengalami empat kali amandemen justru telah memunculkan berbagai kerancuan dalam sistem ketatanegaraan; Perkembangan format politik di era multipartai yang cenderung menimbulkan politik biaya tinggi, lemahnya moralitas dan budaya politik kebangsaan; Masih banyak rakyat Indonesia yang menderita di bawah garis kemiskinan; Maraknya praktik mafia peradilan; dan, Masifnya kemerosotan nilai-nilai budaya nasional. Sehubungan dengan itu, SOKSI memandang perlu Reformasi Jilid II, yaitu Reformasi Budaya yang lebih menekankan pada upaya merekonstruksi kembali budaya nasional sebagai centrum dalam mendorong kreativitas, inovasi dan identitas keindonesiaan.

Selengkapnya, Pernyataan Politik SOKSI yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Rapimnas I SOKSI Nomor: Kep-04/Rapimnas-I/SOKSI/VIII/2006 yang ditandatangani Ketua Umum Depinas SOKSI Syamsul Mu'arif dan Sekretaris Jenderal FMT Radjaguguk, itu sebagai berikut:

Tanpa mengabaikan berbagai hasil yang telah dicapai dalam proses reformasi pembangunan nasional, SOKSI beranggapan bahwa satu windu perjalanan reformasi telah menunjukkan betapa tekad dan harapan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera ternyata belum memuaskan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa perjalanan reformasi belum sepenuhnya memberikan dampak positif dan optimal. Bahkan fenomena menguatnya kekuasaan atas dasar kepentingan-kepentingan para elite politik, baik di pusat maupun di daerah pada akhirnya cenderung melupakan nasib dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam upaya

an Politik SOKSI

culnya Fenomena Phobia Pancasila

memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat pada umumnya. Hal tersebut telah menjadi perhatian besar dan keprihatinan mendalam para kader SOKSI di seluruh tanah air.

Setelah mengkaji dan merefleksikan secara seksama dan mendalam atas keseluruhan proses reformasi yang belum memberikan dampak signifikan bagi transformasi tatatan dan moralitas kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan, maka Rapat Pimpinan Nasional I SOKSI menyatakan pandangan dan sikap politik SOKSI sebagai berikut:

Kesatu: SOKSI sangat prihatin atas menguatnya krisis ideologi nasional yang ditandai dengan muncul fenomena phobia terhadap Pancasila, merosotnya kesadaran elit terhadap Pancasila, bahkan tumbuh suburnya kelompok-kelompok ahistoris yang secara sistematis hendak menggantikan Pancasila. SOKSI sebagai pengawal Pancasila mencermati bahwa tiga kecenderungan tersebut sangat membahayakan bagi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah berbagai potensi keretakan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara merupakan harga mati dan harus tetap dipertahankan dan diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kelanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedua: SOKSI mengamati bahwa praktik pelaksanaan UUD 1945 setelah mengalami empat kali amandemen justru telah memunculkan berbagai kerancuan dalam sistem ketatanegaraan. Di samping belum mampu mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik seperti yang dicita-citakan reformasi, SOKSI memandang hasil amandemen UUD 1945 pasca

reformasi lebih memberikan ruang gerak liberalisasi dan neo-liberalisme. Untuk mengatasi berbagai kerancuan konstitusi dewasa ini, SOKSI



SYAMSUL MU'ARIF ■ mti/mlp

mengajak segenap kekuatan masyarakat untuk merapatkan barisan dan mendorong konsolidasi perundang-undangan termasuk amandemen ke-5 guna mengembalikan jiwa dan semangat UUD 1945 yang diamanatkan oleh *the founding fathers* Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketiga: SOKSI prihatin atas perkembangan format

politik di era multipartai yang cenderung menimbulkan politik biaya tinggi, lemahnya moralitas dan budaya politik kebangsaan yang ditandai dengan maraknya *trend money politics*, sistem presidensial yang tidak efektif, serta mandulnya pendidikan politik dan kepemimpinan politik. Kebijakan multipartai ternyata kurang mampu meletakkan bangunan budaya politik dan mekanisme politik yang bersifat efektif dan produktif. SOKSI memandang bahwa keberadaan dan fungsi partai politik ke depan harus tegas melalui parameter *threshold* sehingga mampu melahirkan jumlah partai yang proporsional guna mendorong efektivitas sistem presidensial sekaligus memperkuat mekanisme *checks and balances*.

Keempat: SOKSI prihatin bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang menderita di bawah garis kemiskinan, masih tingginya tingkat pengangguran, dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Dalam rangka memberdayakan perekonomian rakyat, SOKSI memandang perlu gerakan kekarayaan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia kader-kader ekonomi yang tangguh dan memiliki kemampuan untuk membuka lapangan kerja baru. Seiring dengan semakin menipisnya cadangan bahan bakar minyak, SOKSI mendukung upaya pemerintah di dalam mencari terobosan baru, berupa energi alternatif pengganti bahan

bakar minyak.

Kelima: SOKSI prihatin terhadap maraknya praktik mafia peradilan, kecenderungan penegakan hukum yang belum menyentuh esensi penegakan keadilan, masih maraknya praktik-praktik korupsi, masih maraknya upaya penegakan hukum yang cenderung tumpang-tindih wewenang antarinstansi hukum dan peradilan. SOKSI melihat upaya lebih serius penegakan hukum dan HAM secara adil hendaknya dilakukan dengan pengaturan sanksi seberat-beratnya bagi aparat penegak hukum yang melakukan praktik pelanggaran hukum. Dalam hubungan penegakan hukum, SOKSI juga merasakan sebuah situasi yang sangat tidak kondusif atas terlambatnya pengambilan keputusan pemerintah terhadap kasus Gubernur Provinsi Lampung dalam rangka supremasi hukum yang berkeadilan dalam kepastian hukum guna mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Keenam: SOKSI prihatin terhadap masifnya kemerosotan nilai-nilai budaya nasional, nilai-nilai budi pekerti luhur, dan nilai-nilai kearifan budaya lokal di tengah arus kuatnya komersialisasi, efek negatif globalisasi dan kecenderungan merosotnya keyakinan elit terhadap Pancasila. SOKSI memandang perlu Reformasi Jilid II, yaitu Reformasi Budaya yang lebih menekankan pada upaya merekonstruksi kembali budaya nasional sebagai centrum di dalam mendorong kreativitas, inovasi, dan identitas ke-Indonesiaan serta mengembangkan budaya bangsa yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila tanpa adanya upaya manipulasi dari pihak mana pun.

Ketujuh: Mencermati perkembangan dukungan Partai Golkar kepada Pemerintah dan hasil pembangunan selama ini masih belum mampu mengatasi berbagai krisis yang cenderung merugikan rakyat. SOKSI sebagai salah satu ormas pendiri Partai Golkar mengimbau Partai Golkar agar mengevaluasi kembali dukungan politik Partai Golkar terhadap pemerintah dalam Kabinet Indonesia Bersatu secara kritis, objektif, dan profesional.

Demikianlah pandangan dan sikap politik SOKSI sebagai bentuk keprihatinan dan rasa tanggungjawab SOKSI terhadap eksistensi dan masa depan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Semoga berbagai bentuk keprihatinan dan sumbang saran solusi alternatif sebagaimana telah dikemukakan dapat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Amien. □ mti

PROF DR SUHARDI

URL: www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/suhardiman

Pendiri satu-satunya dan Ketua Dewan Penasihat Depinas SOKSI (Sentral Karyawan Swadiri Indonesia), ini kami juluki futuris politik Indonesia. Personifikasi SOKSI ini juga seorang tokoh pencetak kader bangsa. Mantan Wakil Ketua DPA-RI (1993-1998) kelahiran Gawok, Solo, 16 Desember 1924, yang juga dijuluki dukun politik, itu memiliki kecerdasan dan ketajaman intuisi, insting (indera keenam) memprediksi perkembangan politik Indonesia jauh ke depan.

Prof Dr Suhardiman, SE adalah tokoh politik berjiwa negarawan. Visi dan misi politiknya tercermin dalam dinamika perjuangan organisasi kemasyarakatan SOKSI, yang didirikan dan dipimpinnya puluhan tahun. Dia adalah personifikasi SOKSI. Suhardiman, melalui SOKSI, adalah pencetak kader bangsa. Kaderisasi dalam SOKSI bukan dimaksudkan mencetak kader organisasi, melainkan mencetak kader bangsa, yang berjiwa kebangsaan dan negarawan. *(Selengkapnya baca: SOKSI Pencetak Kader Bangsa, halaman 36).*

Penulis buku *Pembangunan Politik Satu Abad* (1996), ini memiliki insting yang jauh lebih peka dan lebih tajam dibanding pemikiran rasionalnya. Seringkali dia melakukan sesuatu atas dorongan intuisinya yang kemudian dianalisis secara rasional oleh nalarnya. Intuisi politik yang ditindaklanjuti dengan nalar (analisis secara rasional) politiknya memiliki daya jangkau jauh ke depan. Aneka



SUHARDIMAN ■ mti/ricky

pemikiran tentang pembentukan kekuatan bangsa sebagai tujuan yang kedua dari pembangunan politik, yang oleh Suhardiman disebut sebagai Trisula Politik, yakni: Power, Hukum dan Demokrasi. *(Baca juga: Menuju Indonesia Raya Ketiga 2045, halaman 24)*

Dia mendorong adanya upaya modernisasi, rasionalisasi dan dinamisasi diterapkan dalam berbagai kelembagaan politik, pendidikan politik dan pimpinan politik sebagai prasarana dalam pembangunan politik. Prasarana kelembagaan ini tidak bisa diartikan secara sempit hanya sebagai sosok fisik organisatoris, melainkan harus diartikan secara luas

menyangkut sosok sosio-kulturalnya. *(Baca juga: Regenerasi Kepemimpinan Bangsa, halaman 20).*

Dia mengeluhkan, terancamnya jati diri Indonesia saat ini. Reformasi yang berlangsung sejak 1988, dalam pengamatan Prof Dr Suhardiman, SE, belum menampakkan jati diri dan arah tujuan Indonesia masa depan. Sistem dan struktur politik masih harus ditata supaya lebih jelas dan terarah. Dia melihat perlunya reformasi jilid dua untuk lebih mempertegas jati diri dan tujuan masa depan Indonesia. *(Baca juga: Perlu Reformasi Jilid Dua, halaman 30 dan Etos Nasionalisme Baru, halaman 18)*

Suhardiman yang sukses di bidang karir, bisnis dan menonjol dalam bidang politik itu menamatkan pendidikan SD di Solo (1941), SGL Blitar (1945), SMA Jakarta (1956) dan Sarjana ekonomi dari FEUI Jakarta (1962). Sambil bertugas dia terus belajar hingga

FUTURIS POLITIK IND

meraih gelar doktor Ilmu Administrasi Niaga dari Universitas 17 Agustus, Jakarta (1971), dengan disertasi Pembaharuan Struktur Sosial sebagai Prasyarat Pembangunan Niaga Nasional. *(Selengkapnya baca: Tolak Carik Desa Jadi Dukun Politik, halaman 8)*

Selain pendidikan umum, dia alumni Akademi Militer Yogyakarta (1948), Sekolah Infantri Fort Benning, AS (1971) dan Seskoad (1969). Suhardiman, bungsu dari tujuh bersaudara, itu memulai karier sebagai Anggota Polisi Tentara di Kediri (1945). Kemudian Anggota Kiwal PB Jenderal Sudirman (1947). Setelah lulus Akademi Militer Yogyakarta (1948) dia bertugas sebagai komandan Subkomando Distrik Militer Yogya Selatan sampai dia menjabat Kaset KSAP dan Dosen SSKAD.

Pada 1960-an, dia menjabat perwira pembantu utama Menteri Utama Ir H Juanda, mengurus perusahaan-perusahaan negara. Tahun 1960 itu dia bersama rekan-rekan mendirikan SOKSI (Sentral Karyawan Swadiri Indonesia) sebagai imbalan SOBSI/PKI, dengan ide dan konsep kekaryaannya yang kemudian juga diwujudkan dalam wadah Golkar. Di SOKSI dia menjabat Ketua Umum sejak berdiri 1960 sampai 1998). Kemudian melepas jabatan Ketua Umum dan menjabat Ketua MPPO SOKSI (1998 - 2005). Sejak 2005 menjabat Ketua Umum Dewan Penasihat SOKSI.

SOKSI adalah salah satu dari tiga ormas pendiri



■ SUHARDIMAN

Golkar. Suhardiman sendiri aktif sebagai Anggota Dewan Pembina Golkar (1973-1998). Dia juga sempat berkiprah di Senayan sebagai Anggota DPR/MPR (1983 – 1988). Selain itu, Suhardiman pernah menjabat Staf Ahli Menteri Urusan Stabilitas Ekonomi dan Menteri Produksi, Sekretaris Banas dan Penasehat Menperdag. Jabatan terakhir yang diembannya di lembaga tinggi negara adalah Wakil Ketua DPA-RI (1993 – 1998).

Dia juga pernah menjabat Dirut PN Jaya Bhakti, Dirut PT Berdikari, Direktur PT Evergreen Hotel dan Komisaris Utama PT Bank Duta Ekonomi. Di bidang olahraga dia lama memimpin Perguruan Bela Diri Tangan Kosong Indonesia sebagai Ketua Umum. Dia seorang yang rajin melakukan latihan napapasan, silat dan main catur.

Atas berbagai pengabdianya, Suhardiman dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra dan lebih 17 bintang penghargaan lainnya. Universitas Muhammadiyah di Medan mengangkatnya sebagai guru besar. Masyarakat Simalungun memberinya marga "Saragih" saat dia menjabat anggota DPR mewakili Sumatera Utara hasil Pemilu 1982.

Dalam usia berkepala delapan Suhardiman masih membagikan pemikiran dan gagasan cerdas untuk bangsanya. Suhardiman yang sudah pernah terancam meninggal dunia akibat penyakit jantung yang dideritanya, merasa yakin akan hidup lebih lama lagi. *(Selengkapnya baca: Yakin Hidup 100 Tahun, halaman 14).*

Penampilannya memang masih terlihat gagah, wajahnya berseri dan pemikirannya masih tajam. Dia mengasah pikirannya (mencegah pikun) dengan membaca, berdiskusi dan main catur dengan sahabat-sahabatnya, selain secara rutin melakukan senam jantung.

Dia tinggal di Jalan Kramat Batu Nomor 1, Cipete, Jakarta Selatan. Rumah yang terdiri dari tiga bangunan, satu bangunan utama dan dua bangunan lebih kecil lengkap dengan kolam renang dan taman yang luas yang dihiasi suara aneka jenis burung piaraan seperti anis, poksai dan cucak rawa. □

mti-ch robin simanullang

Tolak Carik Desa



Ayahnya
desa berc
Suhardima
tulis atau
menolakny
ingin mel
menjadi te
Militer tah
karir, dia b
dunia polit
sangat pe
ke depan,
dukun poli

Jadi Dukun Politik

Biodata
Nama:
 Prof. Dr Suhardiman, SE
Lahir:
 Surakarta, 16 Desember 1924
Agama:
 Islam
Jabatan:
 Ketua Dewan Penasehat Depinas SOKSI
Isteri:
 Sapartinah
Anak:
 6 (enam) orang

Pendidikan:
 - SD Solo (1941)
 - SGL Blitar (1945)
 - SMA Jakarta (1956)
 - Sarjana FE.UI Jakarta (1962)
 - Akademi Militer Yogyakarta (1954)
 - Sekolah Infantri Fort Benning, AS (1971)
 - Seskoad (1969)
 - Doktor dari Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta (1971)

Karier:
 - Anggota Polisi Tentara, Kediri (1945)
 - Anggota Kiwal PB Jenderal Sudirman (1947)
 - Ketua Umum SOKSI (1960-1998)
 - Anggota Dewan Pembina Golkar (1973-1998)
 - Anggota DPR/MPR (1983 – 1988)
 - Kaset KSAP, Dosen SSKAD
 - Staf Ahli Menteri Urusan Stabilitas Ekonomi dan Menteri Produksi
 - Sekretaris BANAS
 - Dirut PN Jaya Bhakti, 1960
 - Dirut PT. Berdikari
 - Penasehat Menperdag
 - Komisaris Utama PT Bank Duta Ekonomi
 - Wakil Ketua DPA-RI (1993 – 1998)
 - Ketua MPPO SOKSI (1998 – 2005)

Bintang Penghargaan:
 - Bintang Mahaputra
 - Lebih 13 bintang lainnya

Alamat Rumah:
 Jalan Kramat Batu Nomor 1, Cipete, Jakarta Selatan
 - Jalan Iskandarsyah Raya 97, Jakarta Telp: 713731-734913
Alamat Kantor:
 SOKSI
 Gedung Basmar Plaza, Lt 3
 Jl. Mampang Prapatan Raya No 106
 Jakarta Selatan 12760
 Telp. (021) 798 1883 - Faks. (021) 797 0985

yang menjabat kepala
 cita-cita menempa
 an remaja menjadi juru
 carik desa. Suhardiman
 ya secara halus karena
 lanjutkan sekolah. Dia pun
 entara dan lulus Akademi
 un 1949. Namun, dalam
 banyak bergumul dalam
 ik. Intiusi politiknya
 ka dan menjangkau jauh
 sehingga dia digelar
 itik.

keluarganya, hanya dia dan kakak perempuan ayahnya yang memilih agama Islam. Suatu hari, di dalam perenungannya tentang Tuhan, di depan mata Suhardiman tiba-tiba muncul bayangan uaknya yang sedang menunaikan shalat. Lantas Suhardiman terus berpikir dan merenung, bahwa sebagai muslim dia harus menunaikan shalat. "Itulah tekad yang muncul di pikiran saya waktu itu," kata Suhardiman.

Suhardiman yang lahir di Solo, Jawa Tengah, tanggal 16 Desember 1924, ketika menyelesaikan sekolah menengah pertama, penjajah Belanda bertekuk lutut pada penjajah Jepang, tahun 1941. Tak lama kemudian, Suhardiman menamatkan HIS, lantas

Dalam soal agama, ayah dan ibunya, meskipun penganut kepercayaan Kejawen, tidak memaksakan putera-puteri mereka mengikuti kepercayaan mereka. Suatu hari ayahnya bilang pada Suhardiman: "Kamu ikuti bapak, tetapi kalau tidak mampu masuk saja Islam." Suhardiman lebih memilih Islam daripada kepercayaan Kejawen.

Suhardiman kecil secara tak sengaja masuk sekolah dasar swasta. Tetapi setamat sekolah rakyat, dia ingin meneruskan pendidikannya ke sekolah pemerintah. Sayang, tidak berhasil. Tidak berarti dia berhenti sekolah. Dia harus menerima kenyataan, menjatuhkan pilihan pada sekolah swasta, masuk ke HIS (SMP) Muhammadiyah. Meskipun bersekolah di SMP Muhammadiyah, salah satu organisasi terbesar Islam, tidak secara otomatis mendorong Suhardiman rajin shalat.

Di antara anggota

dari Solo berangkat ke Blitar untuk menempuh pendidikan sekolah guru laki-laki. Di Blitar terdapat dua macam sekolah guru, yakni untuk laki-laki dan perempuan. Setelah tamat sekolah guru empat tahun, Suhardiman merantau ke Jakarta (1945) untuk meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi. Tetapi karena pergolakan bersenjata berkecamuk tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Suhardiman tidak sempat menyelesaikan pendidikan SMA. Padahal dia berniat masuk sekolah tinggi olahraga.

Pendidikan Suhardiman terbengkalai karena masuknya tentara Sekutu (Gurkha, Inggris) yang dibonceng oleh tentara NICA Belanda. Maka terjadi konflik bersenjata secara sporadis antara pasukan Sekutu dan para pejuang kemerdekaan yang dipersenjatai dengan senjata-senjata api yang dirampas dari Jepang. Suhardiman bersama teman-temannya terseret di dalam pergolakan, tetapi mereka tidak memiliki ilmu berperang. Sementara itu, Suhardiman bersama lima kawannya—dia lupa nama-nama mereka—mendengar di Yogyakarta dibuka Akademi Militer. Mereka pun berangkat ke Yogya untuk mengikuti ujian masuk. Tetapi kelima-limanya tidak ada yang lulus. Lalu Suhardiman dipercaya oleh ke empat temannya sebagai koordinator untuk menanyakan, kenapa mereka tidak lulus. Waktu itu, Suhardiman ingin menemui pimpinan AM, tetapi dia diterima oleh Letkol Ismail. Suhardiman menanyakan perihal tersebut kepada Letkol Ismail, dan dijawab, mereka memang tidak lulus.

Setelah mendapat kepastian tersebut, mereka mengambil keputusan untuk berangkat ke Kediri, Jawa Timur, untuk menemui paman salah seorang temannya yang berpangkat Mayor TNI. Setelah bertemu dengan sang Mayor, mereka malahan dikirim ke medan perlawanan rakyat di Surabaya dengan pangkat masing-masing Kopral. Mereka bertugas di sana selama tiga tahun. Tetapi ketika bertugas di divisi Surabaya, selain menghadapi aksi polisional Belanda, mereka harus melawan pemberontakan PKI yang meletus di Madiun, tahun 1948. Waktu itu, Suhardiman bergabung dalam Kompi Sayidiman yang diperbantukan di Batalyon Nasuhi. Di dalam batalyon tersebut kemudian

■ SUHARDIMAN

dibentuk lagi satu kompi, diberi nama Kompi II, Suhardiman dan dua temannya bergabung di Kompi II. Tak lama kemudian, Suhardiman dan dua temannya, Himawan, Sutanto dan Urip Widodo, dikirim oleh divisi Surabaya untuk belajar ke Akademi Militer Yogya. Selama menempuh pendidikan militer, Suhardiman, bersama teman-temannya, juga terlibat di dalam peperangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dia lulus AM tahun 1949.

Hadapi PKI

Ketika menempuh pendidikan di AM, Suhardiman memimpin Kompi Suhardiman, dan pernah mengalami kejadian unik ketika berhadapan dengan kaum komunis. Dalam perjalanan naik gunung menuju Wonosari, kompi Suhardiman mendapat laporan dari rakyat bahwa lurah mereka tokoh PKI. Lalu Suhardiman meminta pertimbangan dari para taruna, kemudian mengambil keputusan untuk menetapkan tiga taruna yang dilibatkan di dalam penangkapan lurah tersebut. Padahal sosok fisik lurah tersebut, tinggi besar. Tanpa mengalami perlawanan berarti, lurah itu ditangkap, kemudian digelandang ke kantor wedana.

Ketika digelandang ke kantor wedana, sang lurah mengenakan celana hitam sebatas lutut dan kaos oblong putih. Di dalam perjalanan kedua tangan lurah itu diikat. Mendapat pukulan bertubi-tubi dari warganya, lurah itu tidak melawan, tidak menjerit, diam saja. Seorang warga membakar sabut kelapa, kemudian dilempar ke tubuh sang lurah, tetapi dia tidak terbakar ataupun luka. Warga semakin marah



SUHARDIMAN DAN ISTERI BERSAMA BUNG KARNO ■ mti/dok

sehingga mendesak, sang lurah harus dihukum mati. Lantas Suhardiman meminta nasihat dari seorang kolonel, dan dijawab, "terserah Suhardiman, sebab kamu yang berkuasa." Kolonel itu membubuhkan tanda tangan hukuman mati, diperkuat oleh Suhardiman. Akhirnya lurah tersebut dikenakan eksekusi tembak mati.

Di dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, kembali terjadi keanehan. Di tembak dari segala sudut, lurah tersebut tidak tembus peluru. Kemudian disabet dengan celurit, dia tidak luka. Lantas ada seorang warga yang menyeletuk: "Dia punya *aji-aji* (pegangan)." Tanya Suhardiman: "Pegangannya apa?"

"*Aji-aji* itu ada di celana kolornya," kata warga tersebut lebih lanjut. Lalu *aji-aji* itu diambil dari celana kolor lurah. Kemudian dia ditembak lagi, langsung mati. Percaya atau tidak,

kata Suhardiman, kawan-kawannya yang melakukan tugas eksekusi, di antaranya Suwardi, menderita gangguan jiwa atau stres berat.

Kemudian Kompi Suhardiman melanjutkan perjalanan. Tetapi sebelum masuk ke Jimbaran, mereka bertemu dengan tentara PKI yang melarikan diri. Maka pertempuran pun tak terelakkan. Di dalam pertempuran tersebut, dua taruna anak buah Suhardiman, gugur. Selaku petinggi AM, Letkol Ismail datang mengontrol. Dia marah-marah lantaran ada taruna yang tewas. Tetapi Suhardiman ingin menjaga kewibawaannya di hadapan anak buah, menantang Letkol Ismail. Kata Suhardiman: "Anda pulang saja, saya yang berkuasa di sini." Lantas Letkol Ismail kembali ke Yogya.

Saat itu (tahun 1948), Suhardiman belum tamat AM, sedang menunggu pengumuman hasil ujian akhir. Setelah dia lulus, Letkol Ismail bilang kepadanya: "Suhardiman walaupun kamu sudah lulus kamu harus tambah pendidikan teori." Sebenarnya ketika menempuh pendidikan di Akademi Militer, Suhardiman belum tamat SMA. Namun setelah menyelesaikan AM, dia dikirim ke Amerika untuk menunaikan pendidikan tambahan selama tiga bulan. Sepulang dari AS, dia ditugaskan menjadi instruktur di Sekolah Staf Komando Darat (SSKD), Bandung. Selain menjadi instruktur, dia juga bertugas di kesatuan. Suhardiman masih sempat menyisihkan waktu untuk menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan ke pendidikan tinggi di Akademi Perniagaan Parahiyangan, Bandung. Saat itu Markas Besar Angkatan Darat memintanya bertugas di Jakarta, tetapi Suhardiman meminta penangguhan karena harus menyelesaikan kuliahnya. Berkat



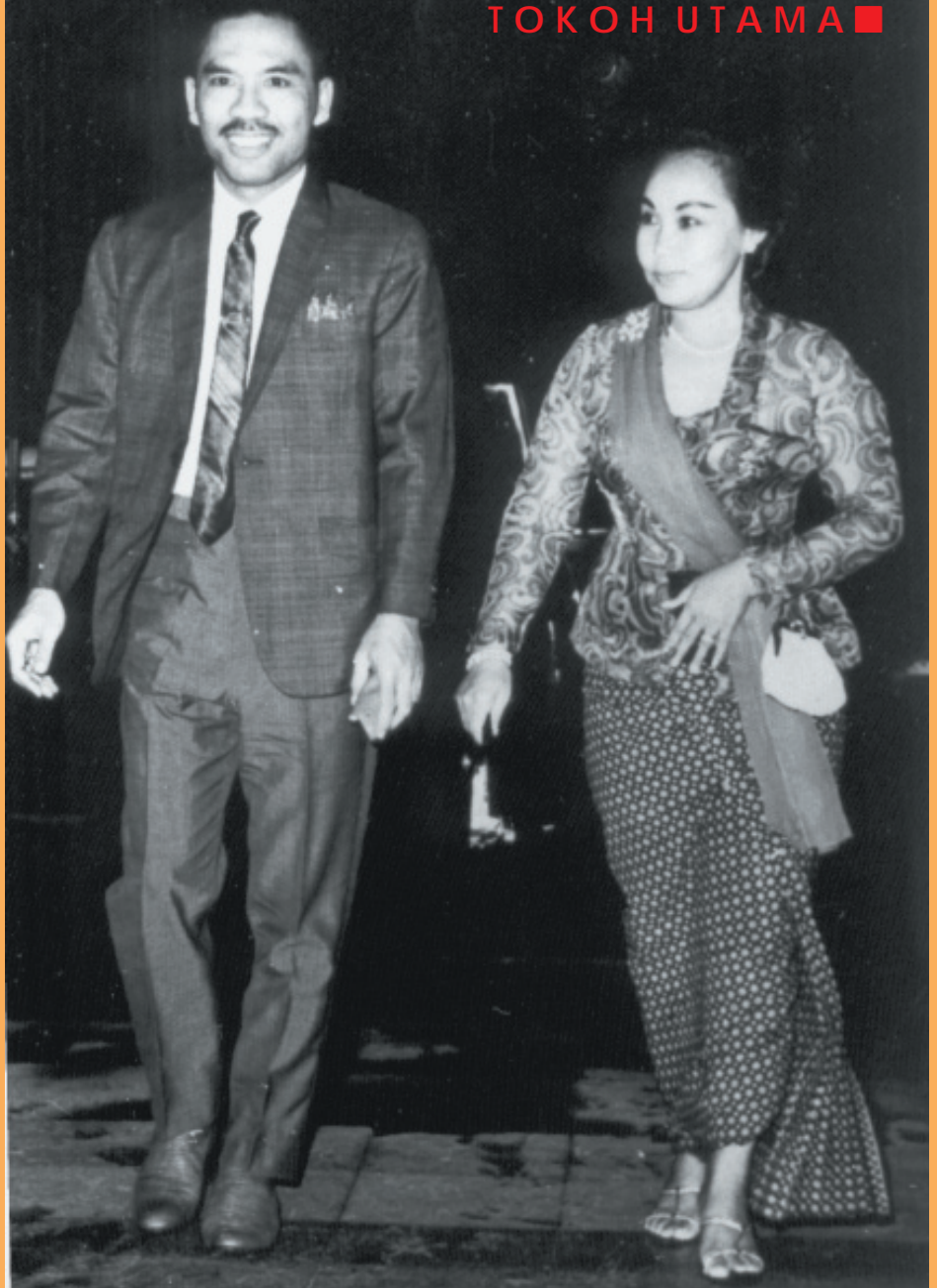
SUHARDIMAN DAN ISTERI BERSALAMAN DENGAN PAK HARTO DAN IBU TIEN ■ mti/dok

ketekunannya, Suhardiman menyanggah gelar sarjana muda pertama di APP. Setelah itu dia melapor ke MABAD, malah disuruh memilih: tugas di Bandung atau di mana. Suhardiman tidak segera memberi jawaban, meminta waktu untuk berpikir dan kembali ke Bandung. Tiga hari kemudian, Suhardiman berangkat ke Jakarta, dan meminta diperbantukan pada Mayjen Suprayogi, Menteri untuk Urusan Stabilisasi Ekonomi. Lantas dia ditugaskan sebagai perwira TNI yang diperbantukan pada kantor sekretariat menteri.

Tidak berapa lama setelah Suhardiman menempati tugas barunya, pemerintah menerapkan kebijakan untuk menasionalisasi semua perusahaan milik Belanda. Semua perusahaan milik Belanda, meskipun sahamnya hanya tiga persen, diambil alih. Sebagai pelaksana kebijakan tersebut, pemerintah membentuk Badan Nasionalisasi (Banas). Suhardiman juga diperbantukan sebagai sekretaris Banas yang dipimpin oleh PM Juanda, tetapi ketua harian dipegang oleh Suprayogi.

Saat itu, meskipun pangkatnya masih rendah, Suhardiman sudah bergaul dengan menteri-menteri. "Sopo aku sopo koe (siapa saya siapa dia), sudah begitu." Lama Suhardiman bertugas di situ. Setelah itu, dia disuruh memilih mau dikaryakan di mana. Dia memilih bertugas di USINDO, lalu menjadi Presiden Direktur PN Jaya Bhakti. Belum sampai dua tahun memimpin perusahaan milik negara tersebut, Suhardiman menerima perintah tidak langsung dari Jenderal AH Nasution, supaya dia menjauhkan diri dari Presiden Soekarno (Bung Karno). "Wah itu tidak bisa," jawab Suhardiman. Suhardiman hampir dua minggu sekali bertemu Bung Karno. Dia sering dipanggil ke Istana Bogor untuk berbicara tentang banyak hal dengan Bung Karno.

Ketika Suhardiman memimpin PN Jaya Bhakti, Departemen Perdagangan dipimpin oleh Adam Malik, bekas Dubes RI di Moskow. Untuk memberantas tindak korupsi, dibentuk Operasi Budi. Pagi sekali, ke kantor Suhardiman datang rombongan beranggotakan tujuh orang jaksa. Salah seorang di antara mereka, Gautama, meminta Suhardiman mengisi formulir. Sebelum mengisi, Suhardiman mengusulkan agar di dalam formulir itu dicantumkan pertanyaan: "Asal-usul kekayaan dari mana?" Tetapi dijawab oleh Gautama: "Ya sudah, isi saja nilai kekayaannya." Padahal kekayaan itu, asalnya dari



SUHARDIMAN BERSAMA ISTERI SAPARTINAH ■ mti/dok

mana harus jelas; bisa dari warisan, hasil usaha atau dari mana. Usulan Suhardiman tidak digubris. Akhirnya dia tulis saja jumlah kekayaannya.

Masalah ini berkepanjangan. Hampir setiap dua hari sekali, Suhardiman dipanggil ke Kejaksaan Agung, dan diperiksa. Tetapi setiap dipanggil kejaksaan, dia selalu optimis. Ketika diperiksa di Kejagung, Kolonel Mukito berjalan mondar-mandir di depannya. "Kurang ajar nih orang," kata Suhardiman dalam hati. Dia diperiksa oleh dua jaksa. Ternyata, Jaksa Gautama, satu dari kedua jaksa tersebut, berindikasi PKI. Rupanya, anggota-anggota Operasi Budi kesusupan PKI. Suhardiman, pada malam harinya dibawa oleh Letjen Suadi ke rumah Brigjen Sutuyo.

Brigjen Sutuyo mengatakan, kesalahan tersebut hanya *miss management*. Saat itu istilah itu masih baru, sehingga Suhardiman menanyakan, "apa sih artinya *miss management*?" Dia juga ingin dijelaskan tentang perbedaan antara *miss management* dan *good management*. "Pokoknya, saya bantah," kata Suhardiman.

Kemudian, perkara Suhardiman sampai juga di pengadilan. Di situ, dia berkenalan dengan seorang hakim. Intinya, hakim itu memberi saran: "Nanti Mas Hardiman, jika diperiksa di pengadilan katakan yang itu-itu saja, tidak usah ditambah dan tidak dikurang." Hakim itu berterus terang bahwa dia mendapat instruksi untuk menjebloskan Suhardiman ke dalam penjara, tetapi itu bertentangan

■ SUHARDIMAN

dengan hati nuraninya sebagai hakim. Suhardiman meminta tolong kepada hakim tersebut agar dia dibebaskan dari semua tuntutan.

Tatkala menjalani pemeriksaan di pengadilan, Letjen Suadi (almarhum), membisikinya: “Dik, ayo kita ke Pak Nas. Operasi Budi dibentuk oleh Pak Nasution. Suhardiman, ketika itu masih berpangkat Mayor, malah menolak. Kemudian Letjen Suadi datang lagi mengajaknya bertandang ke Jalan Teuku Umar, rumah kediaman Jenderal Nasution. Suhardiman akhirnya tidak bisa mengelak. Mereka pergi ke Teuku Umar, dan Suhardiman tetap mengatakan kepada Jenderal Nasution bahwa dia telah dinyatakan oleh pengadilan tidak terbukti bersalah. Lalu Suhardiman meminta Pak Nasution mengumumkan di surat-surat kabar, menyatakan secara terbuka bahwa dia tidak bersalah. Sebab dia terus mendapat tuduhan dan hujatan dari PKI. Tetapi Jenderal Nasution tidak pernah mengumumkannya.

Di era itu, PKI menjadi partai super. Pasukan Pengawal Presiden (Cakrabirawa) yang dipimpin oleh Letkol Untung, kemudian menjadi pemimpin G-30-S/PKI dan Dewan Revolusi Pusat, gagal melakukan kudeta tanggal 30 September 1965. Di bawah komandan lapangan Letkol A. Latief, G-30-S/PKI membunuh enam jenderal yang mereka tuding sebagai anggota Dewan Jenderal dukungan Barat yang akan mengkudeta Bung Karno (presiden) yang sedang sakit-sakitan. Saat itu, Suhardiman berseragam militer, sedang sarapan pagi di Hotel Indonesia. Dia didekati Pak Mujono (kemudian menjadi Ketua Mahkamah Agung), sembari berbisik di telinganya:

“Mas Hardiman apa sudah dengar para jenderal diculik?” Secara spontan Suhardiman berkomentar: “Ini pasti perbuatan PKI. Dan benar, memang PKI.”

Dukun Politik
Suhardiman melanjutkan pendidikan tingginya di perguruan tinggi sangat

bergengsi—Universitas Indonesia—mengambil jurusan Ekonomi Perusahaan. Dia meraih gelar sarjana ekonomi. Kemudian melanjutkan ke program doktoral di Universitas 17 Agustus, mengambil jurusan bisnis administrasi.

Suhardiman memiliki kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Tuhan memberikan bekal kepada setiap manusia—pikiran dan naluri. Pada Suhardiman, nalurinya lebih tajam dari pikirannya. Misalnya, tiba-tiba saja hatinya terketuk ingin pergi ke Sogo, Grand Hyatt, Jakarta. Sepanjang perjalanan, otaknya terus berpikir dan menganalisa, “kenapa saya harus ke Sogo?” Tiba-tiba, dia menemukan jawabannya. Besok dia harus main tenis, padahal sepatu tenisnya rusak. Jadi dia harus ke Sogo untuk membeli sepatu tenis. Jika dia sudah merasa yakin dan pikirannya membenarkan, dia tidak peduli apakah orang lain setuju atau tidak.

Kedekatannya dengan Presiden Soeharto, akrab dipanggil Pak Harto, tidak sedekat seperti dengan Bung Karno. Dia merasa seperti ada jarak dengan Pak Harto. Tetapi pernah dua kali dimarahi Pak Harto. Dalam perjalanan, ketika Pak

Harto masih Pejabat Presiden, Suhardiman berkantor di Merdeka Barat, menjadi sekretarisnya Mensesneg Alamsyah Prawiranegara (almarhum).

Suatu saat, ajudan Bung Karno, Letkol Polisi Sumirat, menelpon: “Pak Suhardiman di panggil Bapak ke Istana,



SUHARDIMAN TABUR BUNGA DIMAKAM ORANGTUANYA ■ mti/dok

harap cepat datang.

“Saya sedang rapat, belum bisa ditinggalkan,” jawab Suhardiman.

“Kira-kira berapa lama?” tanya Sumirat.

“Satu jam,” jawab Suhardiman.

Tetapi Sumirat meminta telepon tidak ditutup karena harus melapor ke Bung Karno. Kemudian, Suhardiman melapor lebih dulu ke Pak Alamsyah bahwa dia dipanggil Bung Karno. Saat itu, Suhardiman baru saja kembali dari menjalankan misi rahasia di Taiwan.

Suhardiman lalu dijemput oleh Soemirat dengan jip *hard top*. Jip tersebut, tahun 1960-an, dianggap jip paling hebat. Turun dari jip, Suhardiman bertanya: “Bapak di mana?”

“Di sana,” jawab Soemirat.

Suhardiman tidak mengenalnya, karena Bung Karno mengenakan pakaian kebesaran, tidak pakai kopiah, hanya bersarung dan kaos oblong. Bung Karno duduk di kursi, Suhardiman ingin menuju ke kursi di depan mejanya. Bung Karno melarangnya. “Jangan, kamu di sini, di samping saya.” Soalnya, Suhardiman takut bersikap sembarangan terhadap Bung Karno. Lalu dia duduk di kursi di samping Bung Karno. Setelah itu, Bung Karno bilang, “Har, kamu sebagai generasi muda, Bapak ingin tanya kepada kamu.” Suhardiman saat itu merasa bangga sekali karena seorang presiden yang sangat dihormati ingin bertanya kepadanya.

“Ada apa rame-rame di situ?” tanya Bung Karno. Lalu Suhardiman menjawab: “Ada demonstrasi-demonstrasi, antara lain menuntut Bapak turun.”

“Tidak bisa. Saya diangkat oleh MPRS,” sergah Bung Karno.

“Tapi tuntutan itu sudah melembaga, Pak.,” komentar Suhardiman.

“Melembaga?” sela Bung Karno



ZIARAH DIMAKAM ORANGTUANYA ■ mti/dok

dalam nada tanya. "Saya dipilih langsung oleh wakil rakyat yang menjatuhkan saya harus rakyat atau MPR yang akan datang," jawab Bung Karno. Dalam hati Suhardiman mengiyakan. Bung Karno yang mengatakan dia akan mempertanggungjawabkan semuanya di depan sidang umum MPRS.

Kemudian, Bung Karno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan SU-MPRS, tetapi ditolak. Pidato tersebut dipotong-potong yang tinggal hanya Nawaksara. Bung Karno turun dari panggung politik, dan Suhardiman berada di dekatnya ketika Bung Karno meninggal tahun 1970.

Lalu, ketika Pak Harto menjadi Pejabat Presiden, Suhardiman dikirim ke Jepang, Taiwan dan Israel untuk menjalani misi rahasia. Di Taiwan, dia membicarakan hubungan bisnis antara Indonesia dan Taiwan. Kemudian, dia ke Israel. Saat itu, bahkan sampai sekarang, Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Dia masuk ke Israel memakai nama samaran Suhardi, paspornya diubah. Di sana, dia bertemu dengan Jenderal Mose Dayan. Mereka membicarakan tentang bentuk hubungan dengan Israel. Akhirnya, dari segi intelijen, ada pembukaan hubungan perwakilan dengan Israel. Suhardiman diberi senjata oleh penguasa militer Israel. Namun lima senjata milik Suhardiman disita dan dikembalikan ke TNI (ABRI) sewaktu dilancarkan Operasi Sapujagad.

Lepaskan Rokok

Suhardiman, memperoleh gelar profesor (guru besar) dari Universitas Muhammadiyah, Medan, Sumatra Utara. Kadang-kadang dia diminta mengajar di Universitas Muhammadiyah, Medan. Suhardiman juga memperoleh kepercayaan menjadi guru besar bela diri Tangan Kosong (Tako) yang dipimpinya. Gelar itu diberikan oleh pemegang Dan Tujuh Sahrin Isak (alm) yang menjadi suhu Tako. Dia tiga kali kena *stroke*, tetapi tidak sampai meninggal.

Sahrin Isak, seorang warga negara Thailand, sering datang ke rumah Suhardiman di Cipete. Suhunya itu perokok berat. Suatu hari Suhardiman menyarankan suhunya (guru) agar berhenti merokok. Tetapi dia jawab: "Akh, masa' karena merokok mati." Tak lama kemudian, sang suhu meninggal karena *stroke* yang keempat kalinya. Suhardiman sendiri tadinya perokok berat, tetapi melepaskan diri dari kecanduan nikotin sejak mendapat serangan jantung sepuluh tahun lalu. □ mti-sh



SUHARDIMAN BERSAMA KELUARGA ■ mti/dok

Kehidupan Keluarga

Tokoh yang dalam situs resmi SOKSI digelar Sang Dukun Politik Indonesia yang pada akhir dasawarsa 1940-an dan awal dasawarsa 1950-an, menjadi taruna dari Akademi Militer (MA) menjalin hubungan dengan seorang putri Yogyakarta, Sapartinah, tamatan sekolah khusus putri Stella Duce yang cukup bergengsi di Yogyakarta.

Situasi dan kondisi bangsa yang saat itu berada dalam ancaman separatisme, dan karenanya membutuhkan keterlibatan para taruna muda untuk terjun ke berbagai daerah yang bergejolak, mendorong jalinan cinta kedua insan muda tersebut ke jenjang pelaminan, yang dilaksanakan pada tahun 1951. Ketika itu, sang pemuda yang oleh rekan dekatnya akrab dipanggil sebagai Mr. Black berusia 27 tahun sementara sang putri Yogya, Sapartinah, berusia 21 tahun, kelahiran Yogyakarta, 25 Juni 1930.

Suhardiman kemudian mempersunting gadis pilihannya itu. Acara pernikahan secara sederhana dilangsungkan pada tahun 1951. Bahtera keluarga yang dibangun oleh pasangan ini

kemudian mengarungi riak, gelombang, ombak, dan badai kehidupan di tengah berbagai perubahan iklim dan cuaca perjalanan bangsa yang kerap kali tidak tenang dan tenteram. Sementara sang suami menyibukan diri dalam dunia politik dan kenegaraan, sang istri di samping setia mendampingi sang suami juga menyibukan diri dalam berbagai kegiatan kewanitaan, seperti Ria Pembangunan, APC (ASEAN Program Consultan), dan aktif dalam mendampingi Ibu Negara Republik Indonesia pada berbagai masa, mulai sejak Ibu Hartini Sukarno, Ibu Tien Suharto, Ibu Ainun Habibie, dan Shinta Nuriah Abdurrahman Wahid.

Bahtera keluarga yang dibangun pada tahun 1951 itu telah berlayar mengarungi samudera kehidupan. Kiranya keluarga yang telah di karunia 6 anak (3 putra dan 3 putri) serta 12 orang cucu ini senantiasa dikarunia kesehatan dan umur yang lebih panjang, untuk memberikan bimbingan dan arahan tidak saja kepada putra-putri, dan cucu-cucu, tetapi juga untuk masyarakat, bangsa, dan negara. □ mti/tsl

Yakin Hidup 100 Tahun

Entah kenapa tiba-tiba Prof Dr H Suhardiman, SE merasa didatangi seorang malaikat. Malaikat itu fungsinya, menurut dia, memang bermacam-macam. Yang datang kepadanya kebetulan malaikat pencabut nyawa. Malaikat itu seolah ngomong kepadanya bahwa kedatangannya sebenarnya untuk mencabut nyawanya. Tapi mendadak ada perintah supaya ditunda. Pertimbangannya, “karena kamu masih dibutuhkan oleh bangsa dan negaramu di sana,” ujar Suhardiman menirukan kata-kata sang malaikat. Ditunda berapa lama? Seratus tahun? “Jadi umur saya nanti seratus lebih, ha-ha-ha...!” tawanya berderai.

DR Suhardiman bukan saja dikenal sebagai tokoh nasional, organisator ulung dan politikus yang disegani. Ia juga digelar sebagai “dukun politik” dengan ramalan-ramalannya politiknya yang sering membuat heboh. Ia juga termasuk pentolan, pembina salah satu jenis olah raga beladiri yang mengandalkan



SUHARDIMAN MASIH FIT DALAM USIA 82 TAHUN ■ mti/ricky | photo

tenaga dalam. Bahkan ia juga diposisikan sebagai “suhu” di olahraga beladiri tersebut.

Ini menjadi salah satu keunikan Suhardiman. Walau menyandang sejumlah gelar akademis, predikat profesor dan doktor yang merupakan simbol dari dunia rasional dan ilmiah, *toh* ia percaya juga terhadap hal-hal yang berbau gaib dan supernatural.

Ketika jatuh sakit, yang secara klinis lumrah terjadi pada setiap orang, Profesor Suhardiman dengan nada berkelakar, menghubungkan hubungannya itu dengan dunia santet. Namun, kepercayaan pada diri sendirinya begitu tebal. Ia tak pernah yakin ada orang yang mampu menyantetnya.

Ketika terkena penyakit jantung

tahun 1995, misalnya, ia justru melakukan meditasi, perenungan dan introspeksi. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa yang salah sehingga ia harus didera penyakit. Uniknya lagi, seperti pernah dituturkannya, meditasinya bahkan diiringi lagu-lagu. Tapi lagunya hanya berlangsung dalam hati dan tidak diiringi musik. Menurutnya banyak juga orang yang senang melakukan meditasi dengan diiringi musik. Tapi ia sendiri tidak.

Meditasi dan pengaturan pernafasan merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan, tandasnya. Kenapa? Menurut Suhardiman, pernafasan teramat penting bagi makhluk hidup. Soalnya, kehidupan dimulai dengan tarikan nafas dan kematian juga ditandai dengan hembusan nafas terakhir. Menurutnya, begitu lahir, oleh Tuhan, kita masing-masing sudah dibekali sekian banyak persediaan "keluar masuk nafas". Semakin banyak persediaan itu umur seseorang akan makin panjang. Begitu juga sebaliknya, makin sedikit stok "keluar masuk nafas" yang didapatkan, seseorang tidak akan berumur panjang.

Dengan Orajira

Yang tak kalah penting menurutnya yakni keseimbangan jiwa dan rasa. Untuk itu, Suhardiman menegaskan pentingnya Orajira, olahraga jiwa dan rasa. "Olahraga hanya untuk kebutuhan lahiriah, tapi jiwa belum. Untuk itu jiwa juga perlu

menjalani kegiatan olah rasa," tandasnya.

Berbekalkan prinsip seperti itu, maka eyang yang sudah ubanan ini selalu optimis akan kesehatannya. Bahkan sangat optimis. "Nggak ada cerita saya akan terkena sakit ini, sakit itu", tandasnya. Karena itu, ia sangat kaget dan tak habis pikir, kok bisa jatuh sakit seperti di tahun 1995 itu. Penyakit jantung lagi, langganan orang kaya dan para politikus.

Tapi, ia masih belum yakin. Soalnya, ia begitu telaten

menjaga keseimbangan hidup, jiwa dan raga. Ia pun segera introspeksi dan memperbaiki hal-hal yang dirasa menyimpang. Latihan ini dan itu. Dan itu semua dikategorikannya sebagai in-put. Sedangkan output-nya, bahkan yang paling besar yakni kegiatan

politik, berpolitik. "Dalam politik kan jatuh bangun. Makan pikiran dan perasaan" ujarnya menjelaskan. Selain itu, juga rokok. Dulu ia mampu ~~menghisap~~ lima bungkus





kretek filter sehari. Lalu *fast-food*, makanan seperti ampla, dsb. Ia mengaku terus terang bahwa out-put-nya lebih besar daripada in put. Tapi ia masih merasa beruntung karena ini diimbangi oleh in-put. “Kalau tidak, mungkin Tuhan telah memanggil saya,” ujarnya terkekeh.

Tapi akhirnya, ia terkena sakit juga. Tak kepalang tanggung, terjadi tiga hari berturut-turut. Habis mandi pagi, tulang di beberapa bagian terasa dipukul-pukul (dengan tenaga dalam), lalu memar. Lima menit, sakitnya memang sempat hilang. Tapi esoknya, habis mandi, sakit lagi, 10 menit. Hari ketiga, 15 menit.

“Pada hari ketiga sudah ditangani oleh profesor yang di Tangerang itu, Profesor Lui” katanya.

Ketika sakitnya dihubungkan dengan Gendeng Pamungkas, ia menampik. Terhadap Pamungkas, ia memang *negatif thinking*. Tapi dalam kaitan dengan penyakitnya, orang ini samasekali dianggap bersih.

Satu kali, ia pernah kedatangan seseorang yang termasuk tokoh di dunia hitam. Selama tiga setengah jam ia dijejali kisah dan cerita tentang santet. Mulai santet dalam negeri, bahkan santet di luar negeri. “Saya cuma dengarin aja. Saya ‘kan awam” katanya enteng.

Tentang awal penyakitnya, “Gejalanya ia rasakan saat di Ever Green, Puncak. Mau duduk sakit, mau tiduran juga nggak bisa. Sampai setengah duabelas malam, ia mondar-mandir saja di *living room*.

Nalurnya memang sangat tajam. Ia kemudian merasa semutan pada kedua tangan. “*Iner-inerji* saya bilang, saya sakit jantung”. Lalu ia membangunkan anaknya Uke dan menelpon anaknya yang tinggal di rumah dinas.

Malam itu juga ia digotong ke RS MMC Kuningan. Pakai ambulans. Di MMC ia dirawat satu hari satu malam. Oleh anak-anaknya, dengan pertimbangan apa kemudian

dipindahkan ke RS Harapan Kita. Di sana ia ditangani dokter Asikin.

“Prof Asikin bilang, tahan diri, Pak! Jawaban saya secara otak. Orang udah lemas gini, kok diminta tahan diri?” ujarnya mengingat-ingat.

Namun dalam situasi gawat pun, nalurinya sebagai “orang pintar” masih berfungsi. Ia pun melakukan sesuatu yang selama ini dia yakin, pernah alami. Tarik nafas, kemudian pelan-pelan dikeluarkan. Itu berlangsung kira-kira sepuluh kali. Ia masih sadar ketika disuntik. Tapi cairan dalam suntikan yang harus melalui paru-paru itu tidak bisa merembes masuk. “Karena terblokir oleh tumpukan nikotin di paru-paru saya,” ujarnya. Sejak itulah ia berhenti total merokok. “Saya masih ingin hidup,” katanya.

Menurut teori, dalam sebulan ia sudah harus dioperasi. Jangan sampai kelewat. Ia pun diterbangkan ke Australia, hanya ditemani anaknya yang pertama dan kedua.

Operasi semacam itu seharusnya cukup tiga setengah jam. Tapi ini rada lain. Setelah tiga setengah jam, ia belum juga keluar dari kamar operasi. “Anak-anak kan worry”. Dan tambah cemas setelah empat setengah jam dan hingga lima setengah jam.

Jangan Sabtu

Ia pun mulai mencium semacam firasat. “Kalau harus punya *gawe* (meninggal-Red) yang penting jangan sampai hari Sabtu.” Entah kenapa, ia seperti ketakutan jika harus meninggal di hari Sabtu.

Setelah lima setengah jam, akhirnya keluar juga dari ruang operasi. Rupanya ada satu *vektor bank* yang hilang. Jangan-jangan ketinggalan di dalam tubuhnya saat operasi. Kalau demikian, berarti ia harus di *blek* lagi?

Setelah dicari-cari, benda tersebut akhirnya diketemukan di bali sarung tangan dokter.

Sesudah menjalani operasi 1995, ia mengaku daya tahan tubuhnya melorot drastis. Namun, setiap bangun pagi, ia masih kuat berjalan tanpa alas kaki, selama beberapa jam. Sekarang, paling banter setengah jam, lalu senam sampai keluar keringat.

Selain ke Australia, Suhardiman juga pernah berobat ke Jepang. Tahun berapa, ia mengaku sudah lupa. Waktu itu, ia diobati oleh tiga anggota tim dokter kepresidenan, antara lain Mayor Jenderal dr Rubiono Kertopati yang kini almarhum. Gelagat adanya penyakit aneh waktu itu sudah dirasakannya. Tapi oleh para dokter, tetap dirahasiakan. Yang pertama kali

diberitahu adalah Bobby, anak pertamanya. “Saya mengidap kanker lever”.

Ketika itu, *medical report* oleh Profesor Obata dibantu oleh tiga orang asisten, yang masih muda-muda. Yang satu ahli kanker, yang satu ahli bagian dalam, yang satunya lagi analis. Sang profesor mengatakan ia harus dirawat dua bulan. Tapi menurut yang muda-muda, cukup dua minggu. Mereka akhirnya kompromi, cukup sebulan saja.

Dalam sebulan itu, ia sudah diberitahu apa saja yang akan dijalani. Mulai dari minggu pertama, kedua, ketiga hingga minggu ke empat. “Di sana itu dokter hanya boleh praktek di dua rumah sakit. Kalau di sini dokter kan bisa ke mana saja,” ujarnya membandingkan pelayanan dokter.

Lalu tengah malam, ia pun berdoa. Aneh bin ajaib, tiba-tiba, sakitnya hilang. Atau barangkali memang bukan kanker? Ia menjadi agak ragu. Lever bengkak dan kanker ‘kan beda? Dalam hati, ia menggugat bercampur heran. Tiga dokter, yang katanya profesional ternyata bodoh. Kok saya disangka terkena kanker? “Ini pasti muzijat!”

Dasar paranormal. Entah kenapa tiba-tiba ia merasa didatangi seorang malaikat. Malaikat itu fungsinya, menurut dia, memang macam-macam. Yang datang kepadanya kebetulan malaikat pencabut nyawa. Malaikat itu seolah ngomong kepada Suhardiman bahwa kedatangannya sebenarnya untuk mencabut nyawanya. Tapi mendadak ada perintah supaya ditunda. “Pertimbangannya, karena kamu masih dibutuhkan oleh bangsa dan negaramu di sana,” ujar Suhardiman menirukan kata-kata sang malaikat.

Ditunda berapa lama? Seratus tahun? “Jadi umur saya nanti seratus lebih, ha-ha-ha”

Oleh-oleh lainnya selama berobat di Jepang, yakni soal umur manusia yang dikaitkan dengan profesinya. Mengutip ucapan Profesor Obata, umur yang terpendek dialami para sumo. Alasannya, hidup mereka kurang harmonis. Postur tubuhnya juga tidak harmonis dan sering berkelahi. Kelompok kedua adalah dokter. Hah, kalau dokter masuk kelompok umur pendek, kenapa Profesor Obata memilih profesi dokter?



KERIS WARISAN ORANG TUA ■ mti/dok

Akhirnya ia faham. Beban mental yang harus dipikul seorang dokter berat sekali. Antara lain kepada pasien dijanjikan bakal sembuh dalam waktu dua minggu. Ternyata lewat dua minggu pasien masih juga sakit, bahkan terkadang makin parah. Ini jadi beban pikiran dan tanggung jawab berat buat dokter yang bersangkutan, sehingga memperpendek umurnya.

Kelompok umur pendek ketiga adalah wartawan. Mengapa? Menurut profesor, ini juga akibat ketegangan mental yang luar biasa sewaktu menjalankan tugas. Setiap isu harus melalui proses yang melelahkan dan terkadang menegangkan. Satu isu yang diangkat jadi berita, bisa berdampak kurang baik bagi media tempatnya bekerja. Kalau sampai medianya diancam atau ditutup, wartawan yang bersangkutan akan merasa sangat bersalah.

“Jadi karena masalah tanggung jawab juga,” ujar Suhardiman yang selama ini dikenal cukup akrab dengan para wartawan itu. □ mti/sh-tum

Etos Nasionalisme Baru

Prof Suhardiman seorang nasionalis sejati. Pada usia senja, sudah menginjak 82 tahun, pria kelahiran Solo ini tidak pernah berhenti berpikir untuk kemajuan bangsanya. Suhardiman punya kemampuan melihat hal-hal yang belum diketahui orang banyak. Suhardiman memiliki ketajaman naluri dan kemampuan menganalisa hal-hal yang akan terjadi. Dia ingin orang lain menyadari tentang kemungkinan terburuk yang bakal menimpa bangsanya agar bisa dicegah sedini mungkin.

Bangsa Indonesia dalam pemikiran Suhardiman harus semakin yakin bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup, ideologi, jiwa, doktrin dan perilaku bangsa Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dia mengamati bahwa dengan banyaknya partai politik semakin banyak pula asas, paham, ideologi dan doktrin yang bisa menumbuhkan hambatan dan ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Wujud berbagai hambatan itu berupa disintegrasi dan instabilisasi nasional. Dia merujuk pada pemberontakan Gestapu/PKI, tanggal 30 September 1965.

Suhardiman, dalam bukunya: *Pembangunan Politik Satu Abad (1966)*, menilai pemerintahan Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang bersumber dan bermuara pada konsep manusia Indonesia seutuhnya. Acuannya, manusia dan masyarakat karya yang mengejawantahkan diri sebagai manusia-masyarakat religius, pejuang dan pekerja yang utuh. Dari sini diharapkan warga negara berjuang dan bekerja atas dasar semangat swakarya untuk diabdikan bagi kepentingan masyarakat dan bangsa.

Menurut Suhardiman perlu ada pembaharuan paham, budaya dan sistem politik yang secara berangsur-angsur mengeliminir berbagai paham budaya, dan sistem politik yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dalam tahapan ini, upaya pembinaan kehidupan politik masih dilakukan untuk menciptakan stabilitas nasional, dengan menitikberatkan dimensi keamanan ketimbang dimensi demokrasi, sehingga mampu menunjang akselerasi pembangunan ekonomi.

Namun dia menghendaki hasil pembangunan politik dan birokrasi jangan mematikan demokrasi. Tahap modernisasi bertujuan menciptakan kerangka landasan pembangunan bidang politik yang ditandai semakin mantapnya Pancasila, tidak saja menjadi dasar negara, *patron and guiding ideology*, melainkan juga menjadi ideologi nasional yang operasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Suhardiman, disadari atau tidak, sebenarnya ideologi nasional tersebut telah menjadi etos bagi 'Nasionalisme Baru' yang memang diharapkan berkembang menuju ke arah kemapanan. Jika konsekuen dengan tujuan ini, pembangunan politik Indonesia diarahkan pada dimensi pemeliharaan terhadap seluruh organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada. Dalam hal ini, mekanisme kepemimpinan politik lebih merupakan perpaduan antara birokrasi dan demokrasi politik.

Suhardiman melihat pembangunan politik sebagai prasyarat penting bagi pengembangan Demokrasi Pancasila secara optimal. Karenanya, sistem dan

mekanisme kepemimpinan politik menuntut porsi yang lebih besar bagi pemekaran demokrasi politik, dalam proses tersebut membutuhkan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis. Hanya dengan jalan ini, menurut Suhardiman, pengaruh negatif berkecamuknya internasionalisme administrasi yang berasal dari negara-negara adikuasa pada era perdagangan bebas di abad ke-21, bisa diredam.

Suhardiman memprediksi bahwa masyarakat karya mandiri akan berproses selama 25 tahun, antara tahun 2019 sampai 2044. Dengan demikian, mulai awal tahun 2045, satu abad kemerdekaan, bangsa Indonesia akan sudah berada dalam wujud Masyarakat Purna, masyarakat dapat merasakan kehidupan adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Suhardiman berasumsi bahwa bangunan politik Indonesia ditopang oleh tiga pilar pokok, yaitu: Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945; Dekrit Presiden 5 Juli 1959; dan Supersemar 1966. Dan yang terpenting adalah bangunan politik tersebut senantiasa berada di atas fondasi yang kuat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai catatan, UUD 1945 sekarang, bukan lagi UUD yang utuh seperti pada masa awal kemerdekaan dan di era Orde Baru. UUD 1945 sekarang telah mengalami empat kali amandemen.

Sebagai seorang profesor dan pakar politik, Suhardiman benar ketika menjabarkan tahapan-tahapan pembangunan politik yang pada dasarnya bertujuan meletakkan kerangka landasan pembangunan bidang politik

yang memiliki tiga pilar utama: (1) Pilar Demokrasi. Pembangunan pilar demokrasi dalam bingkai pembangunan politik terarah pada upaya meningkatkan dinamika, kreativitas, partisipasi serta fungsi pengawasan oleh Parpol dan organisasi sosial kemasyarakatan. (2) Pilar Kepastian Hukum. Pembangunan pilar ini diarahkan pada upaya memberikan perlindungan dan pengayoman bagi pencari kebenaran dan keadilan. (3) Pilar Kewibawaan Kekuasaan Negara. Pembangunan pilar ini bertujuan meningkatkan kewibawaan kekuasaan negara, baik di tingkat supra dan infrastruktur.



SUHARDIMAN BERSAMA PUTERINYA DAN ISTERI (PALING KIRI DAN KANAN) ■ mti/dok

Suhardiman menyimpulkan bahwa modernisasi politik yang ingin diwujudkan adalah modernisasi politik yang berwawasan kebangsaan dengan prinsip kerakyatan yang manusiawi, berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial.

Pembangunan Demokrasi

Konsep nation state, menurut Suhardiman memiliki tiga dimensi: administrative state, service state dan welfare state. Dengan demikian terlihat bahwa yang dimaksud dengan negara dalam hubungannya dengan pembangunan nasional di sini adalah lembaga eksekutif beserta lembaga kelengkapannya bersama dengan lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hubungan ini, secara teknik pembangunan politik hendaknya diusahakan senantiasa mengadakan langkah-langkah ke arah modernisasi, rasionalisasi dan dinamisasi penggunaan hak dan kewajiban berpolitik yang berupa kemerdekaan, keterbukaan dan kebebasan yang bertanggung jawab dari seluruh warga negara Indonesia.

Pemikiran politik Suhardiman memiliki daya jangkau jauh ke depan. Dia mendorong adanya upaya modernisasi, rasionalisasi dan dinamisasi ini mestinya diterapkan dalam berbagai kelembagaan politik, pendidikan politik dan pimpinan politik sebagai prasarana dalam

pembangunan politik. Prasarana kelembagaan ini tidak bisa diartikan secara sempit hanya sebagai sosok fisik organisatoris, melainkan harus diartikan secara luas menyangkut sosok sosio-kulturalnya. Dalam hal ini, tolok ukur untuk mengetahui sampai seberapa jauh partisipasi politik rakyat dapat diwujudkan secara terbuka, bebas dan merdeka, adalah seberapa jauh pula tersedianya kelembagaan politik rakyat secara kualitas dan kuantitas.

Pendidikan politik rakyat, menurut Suhardiman, merupakan unsur yang sangat penting bahkan menjadi titik sentral pembangunan politik. Karena hal itu berguna untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan berpolitik rakyat. Dari sini diharapkan akan lahir dan muncul kader dan pemimpin penerus perjuangan bangsa yang kualitatif. Dalam pembangunan politik, maka adanya kader dan pemimpin ini merupakan faktor yang sangat menentukan, baik ditinjau dari segi sosio-kultural maupun segi historis-politik. Pembentukan kader-kader dan pemimpin politik yang kualitatif, adalah kemampuannya untuk dapat berperan sebagai administrator, solidarity maker dan integrator. Lebih jauh dari itu, kader dituntut mampu berperan sebagai motivator, motor dan dinamisor dari 'nasionalisme baru' yang melekat dengan pembangunan nasional yang dijiwai rasa persatuan dan kesatuan

nasional. Kader dituntut mampu menggerakkan kekuatan bangsa yang merupakan perpaduan serasi antar faktor-faktor kekuasaan, kekuatan dan kekaryaan sebagai kesatuan utuh.

Seorang kader, menurut Suhardiman adalah 'teknisi' dan 'seniman' sehingga dapat menempatkan dirinya sedemikian rupa sebagai seorang ayah, wali, guru, kawan dan komandan. Sejauh ini, aneka pemikiran tentang usaha dan proses

pembangunan kekuasaan negara, kata Suhardiman, baru merupakan salah satu proses dari pembangunan politik secara etik dan teknik. Aneka pemikiran tentang pembentukan kekuatan bangsa sebagai tujuan yang kedua dari pembangunan politik, yang oleh Suhardiman disebut sebagai Trisula Politik. Penjabarannya: Power, Hukum dan Demokrasi.

Pembangunan masyarakat, bangsa dan negara Pancasila dilaksanakan secara konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum. Proklamasi 17 Agustus 1945, UUD 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Tap MPR merupakan sumber hukum pembangunan nasional termasuk pembangunan politik. Semuanya bersumber pada Pancasila yang berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, sumber demokrasi, sumber kekuasaan, sumber kekuatan dan sumber kekaryaan. Faktor-faktor penggerak politik Pancasila berupa kekuatan yang bersifat tridimensial—kekuasaan negara, kekuatan bangsa dan kekaryaan masyarakat.

Kegoncangan-kegoncangan dalam berbagai bidang kehidupan nasional. Kenyataan itu menunjukkan bahwa di sana belum ada konsensus yang mantap dalam menghadapi berbagai persoalan nasional. Akibatnya, pengisian kemerdekaan atau pencapaian cita-cita rakyat untuk menikmati kemakmuran, ketentraman dan keadilan, masih jauh dari jangkauan. Sudah barang tentu, ketidakstabilan ini mempunyai sumber-sumber sangat dalam yang berakar pada struktur kehidupan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari faktor sosio-geografis, sosio-ekonomis, sosio-kultural dan sejarah kepemimpinan politik di Indonesia. □ mti/sh



Regenerasi Kepen

Prof Suhardiman memaparkan pemikirannya bahwa proses regenerasi di dalam pembangunan politik dapat dibagi dalam empat kurun waktu. Generasi pertama mulai era kemerdekaan 1945 sampai tahun 1970; regenerasi kedua 1970-1995; regenerasi ketiga 1995-2020; dan regenerasi keempat 2020-2045.



SUHARDIMAN REMIS LAWAN GM UTUT ADIANTO ■ mti/dok

Regenerasi kepemimpinan bangsa dimaksudkan oleh Suhardiman untuk mencegah kemungkinan gejala sosial yang dapat mengancam stabilitas nasional, khususnya stabilitas politik. Regenerasi pertama dalam periode antara 1945-1970, dikenal sebagai era kepemimpinan sipil, pemerintahan jatuh dan bangun. Regenerasi kedua antara 1970-1995 disebut Suhardiman sebagai era pementapan stabilitas yang dinamis. Maka tidak heran di dalam era ini banyak kader militer berperan dalam pemerintahan. Pembeneran keterlibatan mereka di panggung politik (MPR/DPR) dan pemerintahan alasannya untuk mengubah perjalanan sejarah yang penuh dengan gonjang-ganjing selama kurun regenerasi pertama (1945-1970).

Suhardiman di dalam bukunya, *Pembangunan Politik Satu Abad*, yang ditulis tahun 1996, memang memberi periodisasi regenerasi kedua sampai tahun 1995. Artinya memasuki regenerasi ketiga, 1995-2020, kepemimpinan bangsa bisa berjalan mulus. Tetapi regenerasi ketika tidak berjalan seperti yang dipikirkan dan digagas oleh Suhardiman, sehingga terjadi pergantian kepemimpinan yang gonjang-ganjing tahun 1998. Dan

regenerasi berikutnya (2020-2045) juga akan keluar dari relnya, sehingga perlu dilakukan periodisasi baru.

Era kepemimpinan ketiga yang digambarkan Suhardiman ketika itu, ditandai sebagai era kepemimpinan sipil. Era yang memiliki ciri khas profesionalitas dan persaingan bebas. Pada era ini bangsa Indonesia akan memasuki era perdagangan bebas ASEAN, tahun 2003, dan era perdagangan Asia Pasifik (APEC) pada tahun 2020. Era kepemimpinan keempat (2020-2045), digagas oleh Suhardiman sebagai era kemandirian dan era pemeliharaan potensi dan kekayaan bangsa, khususnya Pancasila dan UUD 1945. Pada era ini, yaitu satu abad setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia akan mencapai masa kejayaan atau Indonesia Raya Tiga.

Suhardiman ketika itu (tahun 1996) melihat perbedaan mengenai konsep dan proses regenerasi dan suksesi. Hal ini telah menimbulkan perbedaan pendapat tentang momentum yang terbaik dan paling memungkinkan ditinjau dari kepentingan nasional, regional dan internasional. Perbedaan itu menyangkut mengenai kapankah saat terjadinya regenerasi/alih

generasi secara tuntas, dan suksesi tanpa menimbulkan gejala sosial yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan NKRI. Soal perbedaan itu, menurut Suhardiman, masih bisa diatasi selagi Pak Harto masih hidup, karena kekuatan dan kewibawaan Orba memang bertumpu padanya.

Suhardiman telah mengingatkan sejarah pergantian kepemimpinan di dalam perjalanan politik di bumi Nusantara, sejak era kerajaan (pra penjajahan), penjajahan, sampai era kemerdekaan yang selalu ditandai dengan pertumpahan darah. Pertumpahan darah ini, menurut Suhardiman, terjadi di samping karena ambisi pribadi maupun kelompok yang terlalu berlebihan, juga disebabkan oleh masuknya pihak ketiga.

Di era kerajaan masuknya pihak ketiga di dalam upaya perebutan kekuasaan sering menjadi pemicu pertempuran di kalangan anggota keluarga kerajaan sendiri, sehingga memakan korban tidak sedikit dari rakyat yang tidak bersalah. Pada masa penjajahan, pihak ketiga adalah penjajah yang sering masuk dalam pertikaian antar keluarga pewaris

nimpinan Bangsa



BOBY SUHARDIMAN BERSAMA ISTERI DAN PUTERA-OUTERNYA ■ mti/dokkel

tahta kerajaan agar raja yang akan memerintah berada di bawah kendalinya. Untuk mencapai tujuannya, kerap kali penjajah menjatuhkan pilihan kepada orang yang tidak atau belum semestinya berada pada puncak kekuasaan. Juga, Suhardiman memaparkan bahwa kemunculan dua pemimpin bangsa—Soekarno dan Soeharto—pasca era kemerdekaan, diwarnai oleh pertumpahan darah.

Tetapi yang menarik, menurut Suhardiman, kemunculan keduanya sama-sama diakui sebagai pemimpin berkaliher internasional, tidak pernah mencalonkan diri atau atau mengupayakan diri menjadi presiden. Sejarahlah yang telah meminta atau mengondisikan mereka untuk menjadi presiden.

Kemunculan Soekarno sebagai presiden, ditandai dengan revolusi panjang yang memakan korban harta dan jiwa yang tidak sedikit. Bahkan, beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus membayar mahal kemerdekaan yang telah direbut itu dengan korban jiwa yang cukup banyak, yaitu sampai

tahun 1949, ketika kerajaan Belanda resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Naiknya Soeharto ke tampuk kepemimpinan negara juga ditandai dengan pertumpahan darah. Pertumpahan darah antar sesama bangsa sendiri ini terjadi karena saudara sebangsa yang menganut paham komunis (PKI) hendak mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. (Kudeta G-30-S/PKI, tahun 1965).

Ramalan Joyoboyo

Tentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pujangga besar Joyoboyo, telah memaparkan ramalannya. Beberapa ramalannya terbukti kebenarannya, di antaranya, mengenai pejahahan kulit putih Belanda di Indonesia dan penjajahan Jepang selama 3,5 abad. Dalam hal kepemimpinan bangsa, Joyoboyo telah menggambarkan bahwa setelah lepas dari penjajahan Jepang, bangsa Indonesia akan dipimpin oleh satrio kinanjoro dan satrio kinayungan.

Figur pemimpin seperti itu, menurut Suhardiman tampak pada sosok Bung Karno dan Bung Hatta. Kedua

pemimpin tersebut adalah satrio yang dalam perjuangannya telah mengalami keluar-masuk penjara. Selanjutnya Joyoboyo meramalkan bahwa pemimpin bangsa setelah itu, satrio sing mukti lan wibowo. Sosok yang diramalkan Joyoboyo ditemukan pada diri Pak Harto.

Bagaimanakah sosok pemimpin Indonesia di masa datang, dan bagaimana pula proses kenaikannya? Mengenai hal ini, Joyoboyo telah memprediksi bahwa pemimpin bangsa yang ketiga adalah seorang satrio piningit, yaitu pemimpin yang dipingit Tuhan. Karena merupakan figur yang dipingit, maka sosok pemimpin masa depan itu, sering menjadi

pertanyaan yang amat menggoda dan memancing para politisi dan pengamat untuk mereka-reka.

Joyoboyo telah memberi gambaran berdasarkan rangkaian (akhirian) nama dari para pemimpin bangsa di masa lalu, masa kini dan masa datang—notonogoro. Akhirian, no, telah diambil oleh Soekarno. Akhirian, to, sudah diambil oleh Soeharto. Berdasarkan uraian suku kata ini maka pemimpin ketiga kelak adalah pemimpin yang suku kata akhir namanya, no. Mungkin yang sudah diambil oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Karena tiga presiden sebelumnya: B.J. Habibie, KH Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Tetapi Suhardiman mengabaikan Yudhoyono sebagai satrio piningit yang diramalkan Joboyo.

Joyoboyo juga menyatakan bahwa kemunculan satrio piningit akan diawali oleh goro-goro (gejolak). Suhardiman (1996) mengingatkan bangsa ini waspada menghadapi kemungkinan tersebut. Goro-goro tersebut memang terjadi menjelang dan sesudah kejatuhan Pak Harto. Tetapi Suhardiman sudah mengingatkan goro-goro (kekacauan) tidak sampai menimbulkan

kemunduran.

Suhardiman sudah mengingatkan bahwa goro-goro ini harus diatasi, dan mau tidak mau, harus dihadapi dan dikendalikan agar jangan sampai menimbulkan korban yang lebih besar.

“Kita harus mengupayakan agar proses kelahiran seorang pemimpin di masa datang tidak menyebabkan ibu pertiwi mengalami pendarahan. Menjadi catatan bagi kita bahwa pendarahan tersebut biasanya memakan korban rakyat kecil yang tidak berdosa,” tulis Suhardiman, tahun 1996. Reformasi mulai bergejolak akhir 1997 dan memuncak tahun 1998.

Konsentrasi kekuasaan terutama, menurut UUD 1945, terletak pada presiden, baik sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, mandataris MPR maupun sebagai Panglima Tertinggi ABRI (TNI). Suhardiman sudah memberi isyarat bahwa kelompok antikemampuan mengarahkan sasaran tembak mereka kepada lembaga kepresidenan dan pribadi Pak Harto.

Secara tidak langsung Suhardiman sudah memberi isyarat bagi Pak Harto, sebagai king maker (penentu permainan), dapat menentukan siapa yang menjadi Presiden. Wakil Presiden dan Panglima ABRI. Suhardiman mengibaratkan dunia bisnis, Pak Harto menghadapi Sidang Umum MPR 1998, bebas memilih tetap menjadi Presiden atau—Presiden



IBU SAPARINAH SUHARDIMAN ■ mti/dok

Komisaris, Presiden Direktur atau King Maker di belakang layar.

Suhardiman telah menyarankan Pak Harto menjadi king maker di belakang layar seperti peran yang dimainkan oleh Lee Kuan Yew di Singapura dan Deng Xiaoping di China. Banyak pihak yang mengatakan belum melihat calon yang pantas menjadi presiden, bilamana Pak Harto duduk di belakang layar. Tetapi menurut Suhardiman, dulu tidak ada orang yang tahu Soekarno, dan kemudian Soeharto, akan menjadi Presiden. Jadi hal ini tidak perlu terlalu dirisaukan, apalagi

saat ini sudah ada penuntun yang berpengalaman.

Waktu itu, Suhardiman menginginkan Pak Harto mencari kader penggantinya secara arif. Kalau tidak dicari sekarang, tulis Suhardiman, nanti dalam proses dialektis, kader pengganti yang muncul sendiri, malah bisa merusak tatanan yang ada karena tidak terbimbing. Dan, persiapan ke arah ini terasa sangat penting, karena dia melihat berbagai organisasi, baik organisasi kemasyarakatan, sosial politik, keagamaan, baik organisasi yang mengagungkan dirinya sebagai yang paling demokratis telah mengalami kerucuhan, kalau tidak disebut kegagalan, dalam melaksanakan kaderisasi dan suksesi di dalam tubuh organisasi tersebut.

Suhardiman juga melihat bahwa aktivitas Koalisi Pelangi (kelompok anti kemapanan) sudah mengarahkan sasaran tembaknya kepada Pak Harto. “Hal ini harus segera dialihkan,” tulis Suhardiman. Caranya? Ada beberapa cara dapat dilakukan, antara lain, berhalangan sementara atau tidak tampil sementara, dan mempercayakan secara konstitusional kepada Wakil Presiden. Namun, apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi yang ada, kepemimpinan Pak Harto sebagai pemegang remote control kekuasaan. (Nyatanya, Pak Harto memilih tetap jadi Presiden, dan hanya tiga bulan kemudian, 21 Mei 1998, meletakkan jabatan). ■ mti/sh



SUHARDIMAN BERSAMA KEPONAKAN DRS SUWARDI (DUDUK) DAN PROF THOMAS SUYATNO (KANAN) ■ mti/dok

Menuju Indonesia Raya Ketiga 2045

Eksistensi dan posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sangat perlu dipahami di antara sepak terjang ideologi-ideologi besar dunia. Pemahaman ini sangat penting dalam rangka pemantapan ideologi Pancasila yang menjadi dasar dan pedoman hidup bangsa. Dengan demikian bangsa Indonesia semakin mampu memainkan peranannya di dalam gerak maju mencapai cita-citanya, yang tidak lain dari masyarakat Pancasila itu sendiri.



Semenjak nenek moyang bangsa Indonesia menginjakkan kakinya di bumi Nusantara, pada dasarnya nilai-nilai yang sekarang dirumuskan dalam Pancasila sudah termaktub di dalam jiwanya, sudah melekat di dalam diri dan pribadinya, dan sudah terpancar jelas dari perilakunya. Dengan kata lain, Pancasila yang sekarang menjadi deologi bangsa Indonesia, bersumber pada jiwa, kepribadian serta pandangan rakyat Indonesia yang telah bereksistensi selama berabad-abad sebelum kemerdekaan.

Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat-akar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Budaya bangsa yang mengutamakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya; maupun dalam mengejar kebahagiaan lahiriah dan rohaniah.

Demokrasi Politik Pancasila didasari atas perjuangan untuk kepentingan dan keselamatan umum yang didasarkan pada prinsip "*sepi ing pamrih, rame ing gawe*". Etos kerja yang didasarkan pada keuletan dan ketekunan demi tercapainya kehidupan yang lebih baik dan maju bagi dirinya dan keluarganya. Ketiga etos tersebut dapat disebut juga sebagai "etos kekarya-an" yang tridimensial atau yang bersifat dialektis-theologis.

Pembangunan nasional yang mencakup bidang-bidang Ipolek-Sosbud-hankam sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dari penghayatan, pengamanan dan pengamalan Pancasila. Demikian juga halnya dengan demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila atau secara singkat disebut Demokrasi Pancasila, itu pun sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, apakah itu demokrasi politik, demokrasi ekonomi ataupun demokrasi sosial budaya.

Di sini perhatian hanya difokuskan pada demokrasi politik yang akan dikaji dari sudut batasan dan cirinya; mekanisme dan gerak dinamikanya dengan suatu latar belakang sikap dan pemikiran

bahwa demokrasi Pancasila itu harus terkait dengan keamanan (*security*) dan kemakmuran (*prosperity*).

Apabila kita hendak mengupas demokrasi Pancasila pada umumnya dan khususnya di bidang politik, maka kita harus pula mengupas proses penyelenggaraan kekuasaan negara dan hukum yang didasarkan pada Pancasila yang sudah terpatikan dalam UUD 1945. Karena politik merupakan dimensi demokrasi, selain dimensi kekuasaan dan hukum, maka perwujudan demokrasi Pancasila akan terkait dengan sistem kehidupan politik di Indonesia yang telah, sedang dan akan mengalami proses pembaharuan dan pembangunan.

Sementara itu, karena pembangunan dan pembaharuan politik merupakan bagian integral dari pembaharuan dan pembangunan demokrasi, politik bangsa, maka ada empat hal yang prinsipil dan fundamental yang harus melekat di dalamnya, yaitu: 1. Pembaharuan dan pembangunan politik harus bersumber pada manusia seutuhnya; 2. Sumber tersebut harus bermuara pada seluruh masyarakat Indonesia; 3. Selanjutnya muara tersebut pada akhirnya harus manunggal dengan lautan negara Pancasila; dan 4. Antara sumber, muara dan lautan tersebut tetap mengalir suatu gerak arus kekarya-an tridimensional yang dialektis-theologis.

Apabila keempat hal yang prinsipil dan fundamental tersebut ditinjau sebagai operasional ideologi, maka yang dimaksudkan dengan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia adalah masyarakat karya yang "mandireng pribadi" dan bertanggungjawab, dalam arti manusia dan masyarakat yang profesional, idealis dan bermoral Pancasila.

Untuk dapat mewujudkan manusia dan masyarakat yang demikian itu, maka sistem serta proses pembaharuan dan pembangunan politik di Indonesia harus mampu menciptakan suasana dan iklim sedemikian rupa, sehingga setiap warga negara dan seluruh rakyat Indonesia mampu "mengolah diri"-nya. Mengolah diri di sini mempunyai arti yang sangat luas, yakni mencakup beberapa aspek gerak hidup manusia, seperti: (1) mengolah raganya, (2) mengolah kecerdasannya, (3) mengolah budi



SUHARDIMAN PENDIRI SOKSI ■ mti/wilson

luhurnya, (4) mengolah jiwa kebangsaan dan kepatriotannya, (5) mengolah profesinya, dan (6) mengolah jiwa kepemimpinannya.

Apa yang dimaksud dengan 'lautan negara Pancasila'?

Sebagai suatu sistem politik yang utuh, negara Pancasila merupakan puncak organisasi kekuasaan dari seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia yang berbentuk negara hukum dan demokratis. Karena

penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara konstitusional dan demokratis serta berorientasi pada kehidupan yang tata-tenteram, dan karta raharja. Dalam proses operasionalnya, dalam negara Pancasila bekerja suatu kekuasaan yang manunggal dengan rakyat yang berpuncak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan berpusat bobot pada Presiden.

Dalam pelaksanaan kedaulatan



SUHARDIMAN PRIHATIN ATAS MUNCULNYA PHOBIA PANCASILA ■ mti/wilson

rakyat, negara Pancasila tidak mengenal atau menganut sistem pemisahan kekuasaan (*the separation of power*), melainkan perbedaan/pemerataan kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif bukanlah unsur-unsur kekuasaan yang masing-masing terpisah. Antara ketiga kekuasaan tersebut terdapat hubungan yang saling mendukung dan saling mengawasi. Masing-masing kekuasaan berdiri berdampingan dan bergandengan tangan.

Dari uraian di atas, jelas tampak bahwa negara hukum yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 atau singkatnya, negara berpusat bobot pada Presiden sebagai panutan tunggal. Ini berarti bahwa pemerintahan negara harus: pertama, secara hukum (dalam arti luas) bertindak sebagai pengemban kesejahteraan atau *welfare state*. Kedua, secara konstitusional

bertindak sebagai abdi rakyat yang mampu menciptakan negara yang melayani kepentingan rakyat umum (*social service state*). Ketiga, secara demokratis sebagai pamong pembangunan yang dapat menciptakan suatu *administrative state*. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa penyelenggaraan negara Pancasila sebagai negara hukum harus dilaksanakan di atas dasar administrasi yang demokratis atau *democratic administration*.

Hal itu berarti bahwa demokrasi Pancasila yang dikehendaki, mengandung makna dan proses fungsional dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, penetapan personil, pengarahan, pengendalian, koordinasi, pengawasan, dan penganggaran secara nasional, regional dan sektoral.

Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Demokrasi

Politik Pancasila?

Tahun 1949 UNESCO menyelenggarakan suatu proyek "*enquete*" yang dikirimkan ke para ilmuwan di dunia. *Enquete* ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pemikiran yang dapat digunakan untuk merumuskan definisi demokrasi.

Dari hasil pengumpulan *enquete* tersebut mereka belum mampu menghasilkan suatu definisi yang tepat mengenai demokrasi. Mereka baru sampai pada suatu kesimpulan bahwa pengertian demokrasi berbeda bagi setiap masyarakat dan negara, karena pengertian tersebut harus dikaitkan dengan kondisi sejarah dan budaya dari negara dan masyarakat bersangkutan. Mereka baru menggambarkan bagaimana demokrasi itu dilaksanakan dan prasarana apa yang diperlukan untuk menjamin agar demokrasi itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Usaha-usaha seperti itu pernah juga dilaksanakan di Indonesia, yaitu ketika para wakil rakyat di DPR RI pada tahun 1975 hendak membuat undang-undang tentang partai politik dan Golongan Karya. Berminggu-minggu mereka mencoba merumuskan definisi Demokrasi Pancasila. Namun mereka hanya mampu merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan pada Pancasila. Sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1985, Pemerintah dan DPR kembali mencoba menyempurnakan perumusan Demokrasi Pancasila. Pada saat itu terdapat sedikit penambahan. Perumusan Demokrasi Pancasila sejak saat itu menjadi "demokrasi yang didasarkan pada Pancasila sesuai dengan Pembukaan UUD 1945".

Menurut hemat penulis, demokrasi adalah suatu bentuk, sistem dan proses usaha pemanunggalan antara pemerintah dengan rakyat yang didasarkan pada persamaan hak dan derajat yang tidak mengenal batas-batas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Karena itu, demokrasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu tentang metoda pengambilan keputusan, dan tentang isi serta jiwa dari pengambilan keputusan tersebut.

Dengan bertitik tolak pada pertumbuhan dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka penulis mencoba memberanikan diri untuk mengemukakan bahwa demokrasi Pancasila adalah: "Cipta, rasa dan karya untuk mewujudkan tanggung jawab, kewajiban dan hak bersama dari setiap warganegara dan seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip ketuhanan, keharmonisan, kesetiakawanan dan toleransi (temu-gelang), keadilan, kerakyatan atas dasar musyawarah dan mufakat untuk menuju masyarakat yang tata tenteram dan kartaraharja".

Dari perumusan tersebut dapat dilihat bahwa Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan Demokrasi Liberal yang didasarkan pada sistem multi partai, atau Demokrasi Terpimpin yang didasarkan pada kekuasaan mutlak dari seorang pemimpin.



IBU SAPARINAH SUHARDIMAN BERSAMA IBU SINTA NURIYAH WAHID ■ mti/dok

Demokrasi Pancasila, dengan demikian adalah demokrasi yang bersifat manunggal. Di dalamnya terdapat pamanunggalan pemerintah dengan rakyat dengan ciri-ciri khas sebagai berikut: Pertama, Demokrasi Pancasila itu memiliki ciri kekaryaannya yang bersifat dialektis theologis, yang mencakup kekaryaannya transedental, vertikal dan internal dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan serta ketaatan.

Kedua, Demokrasi Pancasila mengandung ciri-ciri kekeluargaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebersamaan, keterbukaan, persatuan dan kesatuan. Ketiga, Demokrasi Pancasila mempunyai sifat gotong-royong sebagai perwujudan dari pelaksanaan tanggung jawab, kewajiban dan hak bersama dari seluruh rakyat yang ditempuh melalui sistem perwakilan.

Karena ciri-ciri khas itulah maka Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan dalam sistem politik, tidak menganut sistem revolusi radikal atau perang revolusi untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara. Tetapi menganut sistem pembaharuan dan pembangunan

yang dilaksanakan di dalam kerangka "revolusi damai".

Untuk mewujudkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila tersebut, fungsi-fungsi komunikasi, koordinasi dan integrasi harus benar-benar dijunjung tinggi. Untuk itu diperlukan dialog dua arah antara pemerintah dengan rakyat, antara lembaga negara yang satu dengan yang lainnya, dan antara lembaga masyarakat yang satu dengan lembaga masyarakat lainnya.

Dengan demikian, Demokrasi Pancasila diibaratkan dengan gambar perspektif suatu bangunan gedung arsitektur Indonesia. Tampak agung dan anggun dari segala sudut tinjauan. Selanjutnya, dalam bagian ini akan dikupas berbagai hal yang berkaitan dengan perangkat, kelengkapan dan prasarana kelembagaan yang melekat pada bangunan gedung tersebut.

Negara sebagaimana gedung-gedung adat di Indonesia dibangun secara gotong royong dari kekuatan rakyat sendiri, oleh rakyat, dan untuk rakyat di bawah mekanisme kepemimpinan nasional (negara) yang mampu menempatkan diri sebagai panutan tunggal. Yaitu

sebagai pengemban kesejahteraan umum, abdi rakyat dan pamong pembangunan. Sistem panutan tunggal sebagai prinsip operasional kepemimpinan nasional dalam negara Pancasila, harus benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat yang disalurkan melalui sistem perwakilan di MPR, DPR dan lembaga tertinggi negara lainnya.

Aspirasi, pendapat dan kepentingan rakyat tersebut akan dilaksanakan oleh Presiden yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden di bawah pengawasan DPR.

Dalam melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan negara tersebut, kepada Presiden diberikan tugas dan wewenang untuk mengamankan dan menyukseskan pembangunan serta hak prerogatif untuk mengangkat menteri, menteri negara, dan menteri koordinator yang tidak didasarkan pada pengusulan golongan. Tapi mengacu pada keahlian, pengabdian, prestasi, kejujuran serta loyalitas pada tanah air, bangsa dan negara, sebagaimana dituntut juga dari seorang Presiden.

Pembangunan Politik yang dimulai secara mapan sejak

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dewasa ini telah memasuki babakan baru. Yakni menuju tahap 'Masyarakat Purna' atau 'Indonesia Raya Ketiga' yang diharapkan akan mencapai puncak perjuangannya sekitar tahun 2045.

Keyakinan ini didasarkan pada pemikiran bahwa sejarah akan berulang kembali. Hukum dinamika dan dialektika yang bersifat kodrati telah melahirkan suatu siklus perubahan sosial di Indonesia yang berulang setiap Tujuh Abad dengan produk-produk yang lebih baru dan sempurna pada jamannya. Orang Perancis mengatakan: *historia se repete*.

Sejarah perjalanan bangsa di Nusantara menunjukkan bahwa pada abad ke-7 nenek moyang kita telah mengalami masa kejayaan yaitu, Sriwijaya, yang kita sebut di sini sebagai Indonesia Raya Pertama. Setelah itu kita temukan lagi Indonesia Raya Kedua, yaitu masa kejayaan Majapahit pada abad ke-14. Dan sekarang kita sedang berlayar menuju Indonesia Raya Ketiga yang akan kita capai pada awal milenium ke-3 ini. (Dari Buku "Ideologi Pancasila dan Ideologi- Ideologi Dunia") □ mti/tum

Analisis Suhardiman

■ Tentang Teokrasi, Individualisme, Kapitalisme dan Sosialisme



SUHARDIMAN DI PEKARANGAN RUMAHNYA ■ mti/wilson

Suhardiman bukan saja seorang tokoh politik praktis yang disegani tapi juga seorang pemikir politik yang tajam. Tokoh pendiri SOKSI, salah satu dari tiga organisasi pendiri Golkar, itu sangat tajam dalam menganalisa ideologi dan sistem politik. Hasil proses perenungan dan analisisnya tentang berbagai ideologi yang ada di sepanjang sejarah dunia, sangat menarik untuk dikaji.

Hasil perenungan dan pokok-pokok pemikirannya mengenai ideologi dan sistem politik di dunia telah dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul "Ideologi Pancasila dan Ideologi-Ideologi Dunia". Berikut ini analisisnya tentang Teokrasi/Teokratisme, Individualisme/ Liberalisme dan Sosialisme, yang dicuplik dari buku tersebut.

Teokratisme

Teokratisme didasarkan pada suatu pandangan bahwa segala sesuatu yang ada di atas dunia ini adalah ciptaan Tuhan, termasuk negara. Karena negara diciptakan dan dibentuk atas kehendak Tuhan, maka pemimpin-pemimpinnya pun adalah orang-orang yang ditunjuk dan dikehendaki Tuhan. Karena itu, kekuasaan para raja dan pemimpin negara adalah suci. Pelanggaran terhadap kekuasaan raja dan pemimpin negara berarti pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Dengan demikian, raja dan segenap pemimpin negara hanya bertanggung jawab kepada Tuhan.

Pada abad pertengahan di Eropa, pemikiran dan pandangan ini mencapai masa kejayaannya. Pada masa itu, agama Kristen mendominasi segala aspek kehidupan di Eropa. Negara teokratis dianggap sangat sesuai dengan pandangan agama. Menurut paham ini, kehidupan negara didasarkan pada moralisme yang berorientasi kepada agama. Setiap kebijaksanaan, keputusan politik dan penyelenggaraan pemerintahan negara ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam agama.

Para gerejawan sebagai pemimpin

agama mempunyai kekuasaan yang besar dalam menentukan setiap kebijaksanaan negara. Para raja dan pemimpin negara hanya merupakan pelaksana pemerintahan yang terlebih dahulu mendapat restu dan legalitas dari gereja. Demikian pula dalam hal pewarisan kekuasaan, gereja yang mengesahkan penggantian. Dengan demikian, gereja menjadi pelaksana kekuasaan di dunia, yang dalam prakteknya diserahkan kepada raja atau para pemimpin dunia.

Di Timur Tengah, meskipun ideologi yang berkembang lebih merupakan campuran antara Islam, Nasionalisme (*Chaumiyyah*), Sosialisme (*Isytirakiyya*) dan netralisme (*Muhayadah*), Ideologi Islam tetap merupakan ideologi yang terkuat, yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Arab Saudi merupakan salah satu contoh negara Arab konservatif yang berdasar pada ideologi Islam secara relatif murni. Iran di bawah Ayatollah Khoemenipun membawa Iran kepada ideologi teokratis. Di samping itu, gerakan-gerakan Islam fundamentalis di beberapa negara, juga merupakan fenomena politis yang mengarah pada teokratisme.

Di Asia Selatan, kemunculan ideologi teokratis yang dibarengi dengan gerakan modernisasi yang cenderung bersifat sekuler. Pakistan ketika dipimpin Presiden Zia Ul Haq, merupakan suatu contoh yang menonjol. Namun demikian, teokratisme di luar Eropa yang pada umumnya didominasi Islam, masih menolerir perkembangan ideologi-ideologi lainnya meskipun tidak secara formal.

Individualisme - Liberalisme

Paham ini didasarkan pada anggapan bahwa manusia adalah insan individu. Dilihat dari sejarah perkembangan agama di Eropa, individualisme diidentifikasi dengan reformasi Protestan yang dipelopori Marthin Luther. Paham ini berpangkal pada keyakinan bahwa keselamatan individu telah dijamin oleh rahmat Tuhan tanpa campur tangan Gereja Katholik. Individualisme juga mempunyai kaitan dengan munculnya kapitalisme yang mementingkan usaha individu dan imbalan berupa uang (financial) bagi mereka yang berkarya.

Renaissance juga berperan atas timbulnya suatu humanisme baru yang berpusat pada manusia sebagai ukuran bagi segala hal. Munculnya



SUHARDIMAN, INTUISI DAN NALAR POLITIKNYA TAJAM ■ mti/dok

individualisme tersebut pada dasarnya merupakan suatu pemberontakan terhadap ikatan-ikatan tertib sosial tradisional yang ada dan sekaligus menjadi suatu gerakan menuju otonomi pribadi. Sebagai akibat dari tekanan-tekanan yang berlebihan, karena ikatan-ikatan gereja yang terasa membelenggu pada abad pertengahan, masyarakat Eropa mulai berusaha melepaskan diri dari kehidupan seperti itu.

Perkembangan industrialisasi mendorong terjadinya kolonisasi (kolonialisme) di luar Eropa. Demikianlah, setelah Benua Amerika ditemukan oleh Colombus, para 'protestan', dan beberapa pembaharu lainnya yang melepaskan diri dari gereja, mulai berbondong-bondong menuju 'Dunia Baru'. Para pengikut Luther merupakan pionir dalam mencari kehidupan yang lebih baik dan suasana yang lebih bebas. Para imigran yang dikenal sebagai 'kaumpuritan' atau 'golongan quacker' yang datang dari berbagai negara di Eropa itu juga mulai merintis kehidupan baru di Amerika.

Dengan kerja keras, keuletan serta ketekunan mereka berhasil membangun Amerika menjadi bangsa yang jaya. Mereka berpendapat bahwa kerja keras merupakan ibadah; orang malas tidak disukai oleh Tuhan; kerja keras, rajin dan tekun adalah bahagian dari iman. Bagi mereka, orang yang murah rejekinya adalah orang yang mendapat karunia Tuhan. Keharusan hidup hemat dan menabung menjadi bagian hidup mereka. Hasil tabungan itu kemudian dijadikan modal (capital) yang diinvestasikan dalam berbagai bentuk usaha. Inilah yang kemudian mendorong perkembangan kapitalisme.

Dalam kondisi masyarakat seperti ini, hak dan kebebasan individu dihargai sangat tinggi. Setiap orang bebas berikhtiar untuk memperbaiki nasibnya. Hal inilah yang menjadi landasan bagi tegak berdirinya, demokrasi. Setiap orang secara demokratis bebas melaksanakan apa saja sejauh tidak melanggar hukum. Hak

Perlu Reformasi Jilid Dua

Wawancara Prof Dr Suhardiman, SE



SUHARDIMAN PERSONIFIKASI SOKSI ■ mti/wilson

DR Suhardiman pendiri Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sering disebut sebagai dukun politik. Hal ini terutama dikaitkan dengan seringnya dia membuat geger dengan ramalan-ramalan politiknya yang kemudian terbukti terjadi.

Itu tentang Satrio Piningit misalnya, pertama kali dilontarkan oleh mantan Wakil Ketua DPA tersebut, dan hingga saat ini masih menjadi bahan perdebatan yang seru. Tokoh misterius yang menurut Suhardiman akan muncul setelah era Pak Harto, dan akan membawa bangsa Indonesia ke zaman kemakmuran, ternyata sampai saat ini belum juga menampakkan

diri. Bukankah yang dimaksud SBY? Suhardiman menampik kesimpulan seperti itu.

Karena itu, Suhardiman menjadi sosok kontroversial dalam pentas politik di tanah air. Suhardiman seorang politisi yang cukup disegani. Walaupun di tataran kekuasaan, jabatan tertinggi yang pernah dipegangnya hanyalah sebagai wakil ketua DPA, tapi posisi politiknya kadang

pribadi dijamin seluruhnya, termasuk untuk memupuk kekayaan (modal). Persaingan dalam kondisi kebebasan dapat ditolerir, karena dengan demikian terjadi proses alamiah, di mana yang kuat adalah yang menang (*free fight liberalism*).

Jadi kalau kapitalisme mengacu kepada sistem ekonominya, maka liberalisme mengacu pada sistem sosial-kemasyarakatan; dan keduanya didasarkan pada faham atau prinsip individualisme.

Dalam sejarah perkembangan filsafat politik, individualisme baru tersebut menjadi cikal bakal timbulnya perjanjian sosial. Filsafat politik individualisme berbeda dengan filsafat politik lain sebelumnya, berpangkal tolak dari masalah manusia. Para pelopor filsafat politik ini seperti Thomas Hobbes dan John Locke di Inggris, mengatakan bahwa manusialah yang menciptakan negara melalui perjanjian sosial. Thomas Hobbes pertama-tama menekankan bahayanya anarkhi dan perlunya suatu pemerintahan yang kuat demi terciptanya kehidupan yang baik.

John Locke memiliki pemikiran dasar bahwa manusia pada mulanya hidup dalam keadaan alamiah, dengan hak-hak kebebasan dan hak milik. Untuk dapat memelihara hak-haknya itu dengan lebih baik, manusia membuat suatu 'perjanjian sosial' yang kemudian membentuk suatu masyarakat politik dengan suatu pemerintahan yang berkuasa berdasarkan keputusan mayoritas. Menurut Locke, pemerintah adalah wali yang memegang hak-hak masyarakat. Jika suatu pemerintahan tidak melindungi hak-hak kebebasan dan hak milik individu, itu berarti pemerintahan tersebut mengingkari kepercayaan masyarakat, dan karena itu tidak berhak menyebut diri sebagai pengemban amanat rakyatnya; sebagai reaksinya rakyat dapat menggerakkan suatu revolusi.

Dalam teori perjanjian sosial ini, John Locke menekankan bahwa individu lebih penting dari pada suatu negara. Filsafat dari Locke inilah yang menjadi awal dari liberalisme. Liberalisme yang berawal dari Inggris pada mulanya merupakan suatu gerakan kelas menengah, yang

kala lebih tinggi dari jabatan menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.

Menjelang ulang tahunnya yang ke 82, *Tokoh Indonesia* melakukan wawancara khusus dengan Suhardiman. Berikut ini cuplikannya:

TOKOH INDONESIA (MTI): Usia Anda, bulan 16 Desember 2006 genap 82 tahun. Apa yang Anda lakukan sehingga tetap tampak segar dalam menjalani usia senja?

SUHARDIMAN (SHD): Melakukan olah pernafasan, hirup dalam-dalam, tahan, lalu embuskan keluar. Kenapa? Pernafasan ini sangat penting karena hidup kita dimulai dengan bernafas. Saat meninggal pun, kita juga mengeluarkan nafas. Jadi kuncinya pernafasan. Dalam kehidupan ini, konon oleh Tuhan, kita sudah dibekali sekian juta nafas yang masuk-keluar. Saya juga melakukan Orajira, olahraga jiwa dan rasa. Dalam olahraga, hanya lahiriah yang kita olah, tapi jiwa kita belum.

Saya bukannya takabur. Tapi selama ini dalam hidup saya, nggak ada itu cerita sakit ini, sakit itu. Tapi kenapa saya terkena sakit jantung? Saya lalu terus memperbaiki diri dengan



SUHARDIMAN SAAT DIWAWANCARA TOKOH INDONESIA DOTCOM DI KANTORNYA JL TELUK BETUNG ■ mti/wes

latihan. Karena kebanyakan latihan, *output* lebih besar dari *input*. Ternyata dibutuhkan *input* besar untuk mengimbangi *output* yang besar. *Output* saya justru lebih besar daripada *input*. *Output* yang paling besar adalah bergerak dalam politik. Dalam politik 'kan jatuh bangun, makan pikiran dan perasaan. Juga rokok. Rokok kretek saya dulu lima bungkus sehari. Di sini sampai kuning-

kuning. Lalu juga *fast-food*, makanan seperti ampla, dll.

MTI: Beralih ke hubungan Anda dengan Bung Karno. Punya catatan menarik dengan beliau?

SHD: Dengan Bung Karno, ya, ketika Munas SOKSI yang pertama. Saya diantar oleh Pak Suprayogi meminta kehadiran Bung karno untuk memberikan amanah. Ditanya, apa SOKSI itu? Saya jawab,

organisasi karyawan Pak. Apa karyawan itu? Pekerja, Pak!

Ada tiga syarat yang bapak minta, katanya. Apa itu? Mampu nggak kamu menggelgar pagar ayu? Siap, jawab saya. Terus, nanti wanita-wanita cantik harus di depan. Loh kenapa? Kalau yang jelek muak Bapak, katanya. Siap Pak, jawab saya. Terus yang ketiga, bisa tenang nggak? Siap, Pak!

memperjuangkan kebebasan, pemerintahan perwakilan dan monarki konstitusional.

Dalam bidang ekonomi, para pelopor liberalisme itu memperjuangkan asas kebebasan pasar. Dengan prinsip bahwa negara tidak boleh ikut campur dalam mengatur kehidupan ekonomi. Ini berarti menghapus hambatan-hambatan dalam perdagangan dan industri yang diciptakan oleh kaum merkantilistis tradisional. Meskipun ini merupakan perjuangan kelas menengah dan dalam kenyataannya lebih menguntungkan kelas menengah, program-programnya sebenarnya tidak terbatas pada kepentingan tersebut.

Herbert Spencer seorang tokoh liberal yang terkenal dengan filsafat individualismenya yang kasar. Dia mengatakan bahwa masyarakat pada hakekatnya didasarkan atas perjuangan mempertahankan hidup dengan keras dan tak habis-habisnya. Menurut Spencer, tidak ada gunanya negara untuk mencoba campur tangan melalui peraturan perundangan yang mengatur kesejahteraan. Peranan negara, menurut Spencer, hanya terbatas pada pemeliharaan

ketertiban.

Filsuf lain adalah John Stuart Mill, yang juga terkenal sebagai ekonom. Ia juga mendasarkan pandangan liberalnya atas filsafat individualistik utiliter. Namun kemudian ia cenderung pada filsafat ekonomi yang mengarah pada sosialisme demokratis yang lebih moralistis. Mill mengemukakan bahwa keinginan untuk memperoleh kesenangan yang besar merupakan satu-satunya motif tindakan individu, dan bahwa kebahagiaan yang paling besar dari setiap orang merupakan patokan bagi kebaikan masyarakat dan sekaligus menjadi tujuan dari semua tindakan moral.

Dari antara filsuf-filsuf liberalisme yang terkenal, barangkali Thomas Green Hill adalah satu di antaranya yang memiliki konsepsi liberalisme dalam perspektif moral. Green Hill mengatakan bahwa kebebasan yang sebenarnya harus merupakan kenyataan dan bukan hanya dalam perundang-undangan. Ia menekankan bahwa negara harus menciptakan perundang-undangan untuk menyingkirkan

MTI: Dengan Pak Harto, katanya Anda termasuk yang kecewa?

Saya dua kali dipanggil Pak Harto ke Merdeka Barat. Dipanggil karena ada urusan. Beliau marah. Saya masuk, "Hardiman! Masuk, duduk." Baru beberapa menit, ditanyai macam-macam. Ini gara-gara Radius Prawiro, (almarhum), laporannya nggak benar. Terus saya jelaskan.

Yang kedua, ketika saya sedang di Makassar, dipanggil, dimarahin lagi. Saya jelaskan lagi baru reda.

Siapa yang tidak kenal Suhardiman yang ketika menghadapi PKI termasuk nomor satu? PKI jatuh. Siapa yang tidak kenal Suhardiman yang merintis Golongan Karya? Tapi apa yang saya dapat? Mulai dari situ dulu. Manusia itu punya tiga dimensi, sebagai insan Tuhan, pribadi, dan insan sosial. Macam-macam kepentingan bisa saling bertabrakan, tapi harus dipadukan dengan amal. Tapi oleh Pak Harto saya tidak diberikan apa pun. Hanya sebagai anggota Dewan Pembina Golkar. Duduk di DPP, tidak pernah. Pak Oetoyo Oesman pernah di DPP. Saya tidak. Tapi sudahlah.

Dulu, ketika baru pulang dari Jepang, saya disurati Pak Haris Suhud (Ketua

DPR/MPR) bahwa Pak Dharmono (Ketua Umum Golkar, almarhum) ingin menunjuk saya jadi Ketua Pansus UU Bidang Politik. Saya mengusulkan ayahnya Wijanarko Puspojo. Tapi ditolak. Sumiskum bilang jangan mau Mas Hardiman. Tapi sekretaris saya di DPR mengatakan terima saja.

Biasanya, menggolkan satu undang-undang saja selalu ada promosi. Saya menggolkan lima UU, tapi justru dipindah ke DPA. Jadi anggota biasa. Sedangkan lawan politik saya dari PPP, sekarang sudah almarhum, Hartono Marjono, jadi Wakil Ketua DPR. Sesudah itu saya jatuh sakit, lantas dibawa ke Rumah Sakit. Saat itu Pak Habibie sama Pak Harmoko datang. "Ini ada obat dari Bapak (Pak Harto)," kata Pak Harmoko. Oh ya, terimakasih, lalu saya duduk.

Mereka mengatakan, "Tadi Bapak mengatakan, Pak Hardiman dipercaya menjadi Wakil Ketua DPA." Dalam batin saya, ini belas kasihan. Jabatan ini dikasih. Ya sudah, saya terima.

Lalu tahun 1993, ada kampanye. Intinya adalah memberikan kesempatan satu kali lagi kepada Pak Harto sebagai "pilot bangsa". Jadi cukup 1993 sampai 1998. Tapi setelah itu, oleh

Harmoko dikipas-kipas lagi. Akhirnya mau lagi. Hanya berapa bulan, jatuh.

MTI: Pengalaman di saat detik-detik kejatuhan Pak Harto. Posisi Anda bagaimana?

SHD: Malam-malam, anak saya Bobby yang sekarang di DPR mengatakan, Pak Harto mau mengundurkan diri. Lho, kenapa mengundurkan diri? Ah, saya mau bicara dengan Mbak Tutut. Hubungkan. Bagaimana Mbak Tutut, tanya saya. Ah jangan, nggak usah ketemu. Takutnya berubah lagi, kata Tutut.

Ternyata belakangan, Pak Harto mendengar bahwa orang-orang kepercayaannya seperti Harmoko, Habibie, Ginanjar, Akbar Tandjung menolak mendukung Pak Harto. Akhirnya Pak Harto mengundurkan diri.

MTI: Bagaimana perasaan Anda terhadap Pak Harto setelah lengser?

SHD: Pada zamannya Pak Harto, saya tidak ada budaya *sowan*. Paling-paling setahun sekali, dan itu bersama ribuan orang yang tengah halal bihalal. Tapi pada waktu jatuh, kurang lebih sepuluh hari, saya minta waktu ketemu. Saya tanya: bagaimana kader-kader

yang Bapak percaya itu? Masih setia nggak kepada Bapak? Maaf Pak, satu persatu mereka meninggalkan Bapak. Pak Harto diam saja.

MTI: Pernah minta tolong atau sesuatu kepada Pak Harto?

SHD: Pernah. Saya minta bantuan. Beliau kan punya tiga yayasan. Saya mohon bantuan satu M (milyar-Red). Tapi, katanya, sudah terlambat. Terlambat bagaimana? Alasan Pak Harto, yayasannya sudah diserahkan. Lho, yayasan kok diserahkan? "Daripada ramai-ramai, saya mau tiarap saja," kata Pak Harto. Jadi di zaman Pak Harto saya tidak diberi apa-apa, tapi saya berterima kasih.

MTI: Ketika mendirikan SOKSI, Anda sudah anggota ABRI dan berpangkat Mayor. Apa latar belakang pendirian SOKSI ketika itu?

SHD: Sebelumnya saya 'kan bergerak juga di bidang perburuhan. Ketika saya menjadi sekretaris Banas, itu menyangkut perburuhan. Maka akhirnya saya mendirikan suatu badan atau lembaga, yang pokoknya bisa menghimpun buruh. Tujuannya, saya harus bisa dan saya punya karyawan, karyawan buruh, karyawan tani, karyawan

hambatan-hambatan bagi pencapaian kehidupan yang baik, seperti ketimpangan besar dalam kekuatan tawar-menawar buruh dengan majikan. Green juga memperjuangkan perundang-undangan yang melarang pemakaian tenaga buruh anak-anak dan yang menetapkan jumlah maksimum jam kerja.

Menurut Green, di dalam diri manusia pada hakekatnya terdapat dorongan-dorongan sosial, dan seharusnya ada hubungan timbal balik antara individu dan komunitasnya. Suatu masyarakat liberal, menurut Green, mengakui adanya dorongan-dorongan sosial tersebut dan seharusnya menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan realisasinya.

Dalam perkembangannya, individualisme, kapitalisme dan liberalisme mengalami banyak perubahan, baik menyangkut sistem politik, sistem ekonomi maupun sistem sosial-kemasyarakatan secara keseluruhan. Sistem kapitalisme dan liberalisme tidak sempurna seperti pada mulanya; perbaikan-perbaikan ke arah kepentingan umum dan golongan semakin ditingkatkan. Dalam bidang ekonomi, misalnya, kini

kesejahteraan buruh semakin mendapat perhatian yang layak. Tunjangan, santunan dan jaminan keselamatan kerja dari para buruh dijadikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses produksi. Kaum buruh dan rakyat yang tidak mampu semakin mendapat perhatian dan diberi andil yang berarti dalam kebijaksanaan ekonomi dan politik.

Sosialisme

Sosialisme merupakan tanggapan terhadap revolusi industri dan terhadap kondisi-kondisi yang diciptakan revolusi industri itu. Revolusi Industri menimbulkan berbagai masalah sosial dan masyarakat. Terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Demi keuntungan dan kemajuan perusahaan, upah kerja manusia ditekan serendah-rendahnya, tenaga kerja wanita dan anak-anak disalahgunakan sebagai buruh murah dan kasar, jam kerja yang di luar batas dan keadaan pabrik sangat membahayakan dan mengganggu kesehatan.

Keprihatinan terhadap kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan munculnya pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan sosialis. Kaum sosialis percaya bahwa



SUHARDIMAN DIAPIT TIGA WARTAWAN TOKOH INDONESIA ■ mti/wilson

pendekawian. Pokoknya manusia karya.

Saya mengajak (Almarhum) Sukamto Sayidiman, tidak mau, ya sudah saya jalan sendiri. Akhirnya saya menjadi ketua pembina. Terus, waktu Mubes di Palembang, di sana sampai jam tiga malam memikirkan apa kelanjutan organisasi ini? Saya tugaskan dua orang, sekarang masih hidup tapi sakit-sakitan, Adolf Rahman dan Suwignyo (alm) dari Perkatan, Perkebunan. Tapi macet.

MTI: Akhirnya Anda sendiri yang merumuskan?

SHD: Tadi 'kan saya bilang, inspirasi saya lebih

tajam daripada otak saya. Ya, sudah SOKSI saja. Apa SOKSI itu? Pada waktu itu Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia. Tapi sosialis Pancasila, bukan sosialis PSI. Mula-mula begitu. Jadi, di dalam SOKSI yang terpenting adalah kader, pengkaderan. Keliling ke daerah-daerah untuk pengkaderan pemimpin bangsa, bukan kader SOKSI. Walau oleh SOKSI tapi ini untuk bangsa. Karena itulah, sampai bebe-rapa angkatan kader-kader SOKSI banyak yang menjadi kader bangsa.

MTI: Sepe-ninggal Anda,

pamor SOKSI agak tenggelam. Kenapa?

SHD: SOKSI 'kan sudah 30 tahun. Lalu saya wariskan ke Oetojo Oesman, waktu itu Menteri Kehakiman. Mengapa? Salah satu pertimbangan saya bukan karena otaknya, tapi karena *leadership*-nya. Dia punya duit, ya Menteri Kehakiman. Sebab ketua atau pimpinan tanpa duit tidak baik karena akan kurang berwibawa. Sebab kalau kader datang minta bantuan harus ada duit. Kalau tidak ada duit, janganlah. Tapi Oetojo tidak pernah melakukan pendidikan kader bangsa. Tidak pernah bikin kejutan-kejutan. Lalu anak saya Bobby yang di DPR, mengerti pikiran saya, ganti. Anak saya itu naluri-nya tinggi. Intisarinnya, kalau ganti, penggantinya Syamsul Muarif. Ya, sudah, serahkan saja sama yang muda.

MTI: Dalam Deklarasi Politik SOKSI baru-baru ini disebut-sebut perlunya reformasi jilid kedua. Bisa dijelaskan?

SHD: Jadi begini. Reformasi 'kan sudah 8 tahun. Tapi, apa hasilnya? Begini-begitu saja. Kenapa demikian? Reformasi pertama yang saya katakan jilid satu adalah reformasi di bidang politik. Tapi ternyata salah kaprah. Akhirnya

justru menimbulkan krisis, 13 krisis. Krisis di bidang politik, sosial, ekonomi, hukum dan lainnya. Nah, ini bundar, yang ke-13 itu di tengah yaitu budaya. Bundarannya adalah krisis budaya. Budaya kita adalah budaya tahu diri, tapi kita nggak tahu diri. Budaya kita adalah budaya tahu malu tapi kita nggak tahu malu. Korupsi, semuanya nggak mau tahu, tidak tahu malu. Budaya kita adalah budaya *nrimo, nrimo* yang santun tapi serakah. Budaya kita hidup serasi, selaras, seimbang, tapi selalu konflik. Jadi reformasinya harus ditingkatkan menjadi reformasi budaya.

Transformasi dan reformasi budaya yang pernah tahun 1988 itu telah saya lontarkan. Sekarang harus ada reformasi budaya, mental bangsa. Ini kan sakit mental, sekarang korupsi besar-besaran.

MTI: Menurut Anda, situasi politik tahun depan seperti apa?

SHD: Sekarang ini tantangan berat terjadi di berbagai bidang kehidupan: ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan seterusnya. Keadaannya sedemikian rupa, bencana alam pun terus mendera. Terakhir ini ada lumpur panas Lapindo, lalu asap. Ini sebenarnya gejolak alam. Jadi sulit

pemilikan pribadi atas sarana produksi menghalangi kemajuan manusia dan keadilan. Menurut mereka, masalah ini harus diatasi dengan mengubah sistem kepemilikan bersama.

Menurut Green, di dalam diri manusia pada hakekatnya terdapat dorongan-dorongan sosial, dan bahwa seharusnya ada hubungan timbal balik antara individu dan komunitasnya. Suatu masyarakat liberal, menurut Green, mengakui adanya dorongan-dorongan sosial tersebut dan seharusnya menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan realisasinya.

Pendekar utama sosialime adalah Karl Marx, dengan bukunya yang terkenal itu "Das Kapital" dan "Manifesto Komunis". Teori mengenai perkembangan masyarakat dan pandangan sosialisnya mendapat pengaruh dari filsafat dialektika George Wilhelm Friedrich Hegel. Menurut Hegel, kebenaran yang sempurna dari semua hal dapat ditangkap oleh pikiran manusia dengan cara dialektika. Yakni proses berpikir dari tesis melalui antitesis menuju sintesis.

Suatu tesis yang diajukan mengenai suatu hal tertentu pasti

bersifat tidak sempurna akibat ketidaksempurnaan manusia. Dan tesis juga terbatas oleh perspektif sejarah masanya. Karena ketidaksempurnaan itu, timbullah kritik-kritik terhadapnya dan pengeritiknya berusaha memperbaiki kesalahannya dengan mengajukan tesis yang berlawanan sebagai tesis kedua yang disebut dengan antitesis. Tapi karena antitesis ini juga tidak sempurna kebenarannya, maka timbul tesis ketiga yang disebut: sintesis, yang mengandung unsur-unsur kebenaran dari tesis pertama dan kedua. Tetapi dalam perkembangannya ternyata sintesis ini pun tidak sempurna kebenarannya, sehingga proses dialektika pun mulai lagi dengan munculnya antithesis lainnya. Marx mengambil dialektika Hegel dan mengubahnya menjadi, "dialektika materialisme" yang berasumsi bahwa kenyataan asasi merupakan persoalan yang selalu bergerak. Kenyataan selalu berada dalam suatu keadaan yang terus menerus berubah, dan kemungkinan sangat dipengaruhi oleh hukum gerak perubahan itu.

Menurut Marx, proses dialektika tidak hanya terjadi dalam ide, melainkan juga dalam masyarakat dan dalam

ditanggulangi. Artinya, memang harus kita lalui, suatu proses yang harus dijalani oleh bangsa ini, ujian. Mudah-mudahan saya salah, tahun 2007 nanti akan banyak orang teriak-teriak dan turun ke jalan, akhirnya pemerintah jatuh. Karena periodenya belum habis, maka bisa dibentuk pemerintahan sementara, presidium. Nah, dari presidium itulah nanti akan muncul orang yang tidak diduga-duga. Tidak disangka-sangka muncul sebagai pemimpin yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mula-mula sih bodoh, tapi diridhoi. Ini yang dinamakan Satrio Piningit.

MTI: Bukankah SBY Satrio Piningit yang dimaksud?

SHD: Bukan... bukan!

MTI: Jadi Anda memperkirakan tahun 2007 akan terjadi peristiwa dramatis?

SHD: Mudah-mudahan saya salah. Ujian terberat di bulan Desember 2006 ini. Alam mengganggu, ekonomi begini, asap, pengangguran dan sebagainya. Kalau SBY tidak bisa mengatasi, 2007 nanti masyarakat akan turun ke jalan. Nggak bisa dibendung dan saat itu muncullah Satrio Piningit.

MTI: Satrio Piningit itu kira-kira siapa? Sosoknya seperti apa, bisa digambarkan?

SHD: Belum bisa. Seperti namanya, ya masih dipingit oleh Tuhan.

MTI: Kembali ke masalah ketatanegaraan. SOKSI juga menyatakan perlunya amandemen UUD 1945 yang kelima. Untuk apa?

SHD: Jadi begini, kepemimpinan reformasi itu kan Amien Rais, antara lain. Amien Rais itu kan nama Arab, dalam bahasa Jawa sebetulnya *amino ora iso*. Artinya, akhirnya gagal. Empat kali amandemen. Sekarang simpel saja. UUD 45 seratus persen dibuat negarawan. Negarawan semuanya. Kalau negarawan itu kan memikirkan kepentingan bangsa dan negara, dan ini yang diubah oleh Amien Rais. Itulah politik-politikus. Yang di DPR-MPR itu politikus semua. Politikus itu 'kan untuk kepentingan golongan atau kelompok.

UUD 45 disalahkan, perlu diubah, terjadilah amandemen. Sebenarnya bukan UUD 45-nya, tapi manusianya yang salah menjabarkan. Dalam disertasi saya tahun 1971 saya sebutkan, untuk mewujudkan UUD 45 itu

berapa lama agar menjadi kenyataan. Dalam disertasi itu saya sebutkan, bangsa kita dijajah tiga setengah abad maka perlu ditebus dalam satu abad. Contoh, Amerika Serikat, didirikan oleh para pemimpinnya dua abad yang lalu. Terus revolusi industri, itu juga satu setengah abad, di Perancis juga di Inggris. Restorasi Meiji di Jepang juga satu abad. Jadi saya tegaskan penjajahan di Indonesia harus ditebus dalam satu abad. Sementara ini, perjalanan kita baru setengahnya. Maka saya merasa yakin, karena prosesnya harus kembali ke amandemen yang kelima, dekrit, seperti Bung Karno dengan dekritnya kembali ke UUD 45. Sekarang, siapa pemimpin yang berani dekrit?

MTI: Anda menilai Presiden SBY tidak berani?

SHD: Saya nggak bilang deh. SBY itu seorang pemikir. Tapi yang dibutuhkan dari seorang pemimpin yang lima itu. Dekrit itu kan butuh keberanian. Jadi, justru dekrit itu dari presidium. Masalahnya pada pelaksanaan UUD 45 yang terus berkembang, tiap abad, tiap 10 tahun, berkembang. Yang sebenarnya, tiap-tiap pasal

termasuk pembukaan, mestinya pakai adendum, bukan diubah, tapi diberi penjelasan, bukan diubah total.

MTI: Termasuk soal pemilihan presiden, masa jabatan presiden?

SHD: Ya, itu juga yang perlu kita pertanyakan. Berdasarkan UUD 45, seluruh lembaga negara itu diperintah dan diatur melalui UU. Tapi lembaga kepresidenan tidak diatur.

Nah mengapa? Dalam UUD 45 itu, menurut saya, yang paling berkuasa adalah MPR. Jadi tergantung MPR sendiri. Bisa saja baru sebulan atau dua bulan sudah bisa diganti karena dinilai tidak becus.

MTI: Sebagai pelaku sejarah, bagaimana Anda melihat kurikulum sekarang ini?

SHD: Ketika Gus Dur menjadi presiden, belum ada sebulan, sudah mau mengganti Tap MPRS No. 25/1966. Tapi kan lebih bagus mengubah penjelasannya sedemikian rupa sehingga kita tidak dendam kesumat sampai sekian abad terhadap PKI, terhadap komunis. Harus ada batasnya.

Mengenai kurikulum, mula-mula ada dua pemikiran. Ini perlu kita

dunia kebendaan. Dasar pemikiran dari teori Marx yang disebut materialisme dialektika, adalah bahwa segala sesuatu akan menimbulkan hal-hal yang berlawanan, bertentangan dan konflik satu sama lain. Hal-hal yang pada mulanya bersifat kontradiktif ini akhirnya timbul semacam keseimbangan. Teori ini dipakai oleh Marx untuk menganalisa masyarakat. Menurut Marx, pada awalnya masyarakat tidak mengenal milik pribadi dan tidak mengenal kelas; masyarakat seperti ini disebut komuni primitif.

Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat mulai mengenal dunia milik pribadi dan pembagian kerja, dan karena itu mengenal pula pembagian kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang semula membentuk komuni primitif, pada suatu ketika menjadi masyarakat berkelas, dan pada saat itulah gerak dialektis dimulai.

Marx percaya bahwa sejarah dari semua masyarakat manusia merupakan sejarah perjuangan kelas. Kapitalisme tumbuh dari feodalisme. Dengan penemuan benua Amerika dan pembukaan pasar-pasar baru di seluruh dunia sebagai akibat kemajuan pelayaran, industri dan perdagangan, maka

tatanan feodal lama mengalami kehancuran.

Perkembangan kapitalisme mengakibatkan revolusi industri yang menimbulkan suatu kelas buruh industri modern, yang disebutnya kaum proletar. Di bawah kapitalisme, tenaga kerja menjadi komoditi yang diperjualbelikan, dan penerima upah menjadi seorang budak perahan karena upah itu semakin lama semakin merosot. Jika dalam masyarakat feodal pertentangan terjadi antara kelas pemilik tanah dengan kelas penggarap tanah atau antarkelas pemilik dengan kelas budak, maka dalam masyarakat kapitalis pertentangan terjadi antar kelas majikan dengan kelas buruh. Kalau dalam masyarakat feodal pertentangan itu dimenangkan oleh kelas borjuis, yang kemudian membentuk masyarakat kapitalis, maka dalam masyarakat kapitalis pertentangan akan dimenangkan oleh kaum proletar yang kemudian menciptakan masyarakat tanpa kelas.

Demikianlah pemikiran-pemikiran Karl Marx yang kemudian dikembangkan lebih lanjut para pengikutnya. Lenin, misalnya, menganggap bahwa dalam masyarakat berkembang petani mempunyai peranan penting di dalam revolusi. Kaum buruh di negara berkembang belum kuat

luruskan. Ini Gestapu dan Gestok, apa bedanya? Jikalau Gestapu, lengkap Gestapu/ PKI, Gerakan 30 September PKI. Kalau Gestok, itu militer. Sekarang ada perempuan anggota DPR yang merasa bangga menjadi anak PKI. Itu yang saya katakan komunis gaya baru (KGB). Harus hati-hati. Komunis tidak akan pakai bendera PKI, bodoh, orang sudah tahu sekian lama kok. Mereka bisa masuk melalui berbagai cara. Malah beberapa bulan yang lalu terjadi di Bogor.

MTI: Antara lain dengan beredarnya baju bergambar palu arit?

SHD: Ya, pokoknya dalam doktrin komunis tidak ada istilah gagal. Kalau gagal pasti akan diulangi lagi.

MTI: Melihat percaturan global yang ditandai kebangkitan ekonomi Cina, akankah terjadi era perang dingin baru?

SHD: Kalau saya melihat yang akan masuk orang kulit kuning. Jadi yang menguasai adalah kulit kuning seperti Jepang, Singapura, Hongkong, Korea Utara, Korea Selatan. Sekarang ada Cina *overseas* yang menguasai. Nah, ini 'kan menyeluruh. Jadi nantinya perubahan kekuasaan antara

kuning sama Yahudi. Yahudi ini juga merayap ke mana-mana. Amerika itu ya Jahudi. Jadi itulah, kita juga harus memperhatikan Cina yang pesat sekali kemajuannya. Jangan menolak, begitulah.

MTI: Itu berarti perseteruan kapitalis dan komunis sudah pupus?

SHD: Kita sekarang menganut sistem multi partai, masing-masing punya ideologi. Ada yang liberalis, ada yang ini, itu. Jadi sekarang, Pancasila bukan lagi satu-satunya azas. Demokrasi kita juga sudah menyimpang jauh dari Pancasila. 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kemarin perwakilan tapi sekarang nggak lagi, sudah pemilihan langsung. Ini kan sudah menyimpang dari Pancasila.

Demokrasi kita itu ada dua, pemilihan langsung dan tidak langsung. Pemilihan langsung itu di mana rakyat, seperti zaman Belanda, kelurahan itu dipilih rakyat, itu masih ada. Tapi sekarang terdiri dari beribu-ribu pulau, bagaimana? Memilih RT nya saja belum bisa. Konsep negara kesatuan kita tidak murni lagi. Sekarang ada perwakilan daerah yang diketuai oleh Ginanjar yaitu DPD. Ini kan

semacam federal. Jadi negara kesatuan kita tidak seperti dulu lagi.

MTI: Lebih mengarah kepada semi parlementer?

SHD: Ya. Juga mengenai kekuasaan. Dulu yang lebih berkuasa adalah presiden. Sekarang tidak lagi, bahkan DPR kini lebih berkuasa dari presiden.

MTI: Kita juga sudah melaksanakan otonomi daerah. Komentar Anda?

SHD: Otonomi ini kebablasan, demokrasi kita juga kebablasan.

MTI: Negara kan harus punya visi, bukan visi partai, bukan pula visi presiden. Apalagi Garis-Garis Besar Haluan Negara tidak ada lagi. Tanggapan Anda?

SHD: Memang sekarang yang menonjol adalah visi kelompok, golongan, visi partai. Berapa jumlah partai sekarang? Jadi kuncinya adalah bagaimana agar masing-masing pemimpin menempatkan diri sebagai pemimpin bangsa. Mulai sekarang para tokoh-tokoh kita harus sepakat kembali ke UUD 45. Mereka harus menjadi tokoh Indonesia murni bukan tokoh golongan, bukan tokoh partai. Tapi rupa-rupanya, kita kan *black out leadership* yang

sekarang ini. Perjalanannya memang sulit. Masing-masing tokoh kita harus mau meninggalkan partainya. Misalnya, saya memang pimpinan SOKSI tapi harus tetap menjadi milik bangsa. Jadi beda dalam mengambil keputusan.

MTI: Konsep Anda tentang kepemimpinan itu seperti apa?

SHD: Menurut saya, ada lima peran seorang pemimpin. *Pertama*, ia harus mampu menjadi seorang bapak, mengondisikan sedemikian rupa sebagai seorang bapak, sehingga walau tanpa mengkomando, anak buah sudah *ngerti*. *Kedua*, seorang pemimpin juga harus bisa menjadi wali, mewakili kepentingan yang diwakilinya. *Ketiga*, seorang pemimpin harus menjadi seorang guru, mendidik anak didiknya untuk maju ke depan. *Keempat*, seorang pemimpin juga harus bisa menjadi teman. *Kelima*, seorang pemimpin juga harus mampu sebagai komandan. Seorang komandan itu, jika anak buahnya berjasa harus diberikan balas jasanya yang setimpal dengan jasanya. Jangan pilih kasih. Tapi kalau salah, juga harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. □ **mti/sh-tum-wes**

karena tingkat industrialisasi masih rendah. Lenin mengemukakan juga pentingnya peranan partai pelopor yang militan, yang terdiri dari 'profesional revolutionaries' untuk memimpin kaum proletar. Lenin dan para pengikutnya menekankan bahwa imperialisme harus diganyang karena dia hanya memperpanjang hidup kapitalisme.

Pemikiran Marx mengenai suasana yang penuh kontradiktif di dalam masyarakat, pencapaian tujuan dengan jalan kekerasan dan revolusi radikal, penekanan kebebasan pribadi demi kepentingan bersama, ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para pengikut atau para pengagumnya. Pemikiran Marx ini kemudian direvisi dan diubah serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Eduard Bernstein misalnya, berpendapat bahwa tujuan dapat dicapai tanpa revolusi, tanpa perubahan secara radikal. Perubahan dapat dilakukan secara damai melalui jalan parlementer dan atas dasar hak pilih umum. Dia menghendaki perubahan secara progresif evolusioner. Pemikiran yang dikemukakan oleh Bernstein ini disebut dengan revisionis, karena sangat menyimpang dari konsep perlunya revolusi.

Banyak tokoh reformis yang berusaha menyesuaikan ajaran Marx dengan lingkungan masyarakatnya. Sebagai contoh adalah Milivan Jilas dari Yugoslavia. Ia menerjemahkan dan menjabarkan ajaran Marx, yang dijabarkannya sesuai dengan kondisi yang dialami dan dibutuhkan di Yugoslavia. Dia dipandang sebagai orang sosialis yang agak 'nasionalis'. Negara-negara Eropa Timur pun, rata-rata telah memodifikasi komunisme sedemikian rupa, sehingga mereka disebut sebagai 'negara sosialis' (bukan lagi komunis).

Di Republik Rakyat China, diktator proletariat disebut 'diktator demokrasi rakyat', sedangkan Partai Komunis China (PKC) merupakan elite intelektual seperti yang dimaksudkan oleh Lenin. Diktator demokrasi rakyat tersebut dianggap benar-benar demokratis, karena merupakan kediktatoran mayoritas atas minoritas. Sedangkan Partai Komunis China dianggap paling memahami kepentingan rakyat, karena kedudukannya sebagai pemimpin kelas proletar.

Meskipun demikian, semenjak Deng Xiao Ping, pengaruh kapitalisme berupa ekonomi pasar yang lebih terbuka telah mulai merasuki negara China. □ **mti/tum-wes**

SOKSI Pencetak Kader Bangsa



SOKSI, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, sebuah

organisasi kemasyarakatan (ormas) pencetak kader bangsa, bukan kader organisasi. Berasas Pancasila yang dalam melaksanakan perjuangannya berorientasi pada karya dan kekayaan (doktrin karyawanisme). Bukti sejarah kelahiran dan perjuangannya telah membuktikan peran Ormas ini dalam mencetak kader bangsa yang mencintai bangsa dan negaranya di atas kepentingan golongan.

Hal ini itu juga terpatri dalam asas, tujuan dan tugas SOKSI yang digariskan oleh pendiri dan para pimpinannya dalam anggaran dasar. SOKSI yang didirikan pada 20 Mei 1960 dan menjadi salah satu Ormas pendiri Golongan Karya (disebut Trikarya bersama Kosgoro dan MKGR) itu yang dalam melaksanakan perjuangannya berorientasi pada karya dan kekayaan bertujuan: (1) Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (2) Mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (3) Mengembangkan sistem kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum; (4) Meningkatkan kualitas manusia Indonesia sebagai manusia Pacasila; (5) Menegakkan dan menjunjung tinggi hak

SUHARDIMAN DENGAN JAS KEBESARAN SOKSI ■ mti/ricky | photo

asasi manusia; dan (6) Meningkatkan pengabdian bagi masyarakat melalui karya dan kekaryaannya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan lahir dan batin.

Dalam rangka mencapai tujuan itu, oleh pendirinya Prof Dr Suhardiman, SE, menggariskan enam tugas SOKSI. **Pertama**, meningkatkan penghayatan, pengalaman dan pembudayaan Pancasila sebagai ideologi nasional dan satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, mendorong dan meningkatkan peranserta anggota dan masyarakat pada umumnya dalam menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. **Ketiga**, meningkatkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi anggota dan masyarakat pada umumnya.

Keempat, mendidik, melatih dan membimbing para anggota dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan integritas dan kualitas diri serta kualitas karya dan kekaryaannya. **Kelima**, meningkatkan pelaksanaan karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Keenam, mendirikan dan membina wadah pengabdian masyarakat sebagai sarana bagi anggota atau masyarakat pada umumnya, menyalurkan karya serta dharma baktinya sesuai dengan dan kemampuan masing-masing.

Menurut Prof Dr Suhardiman, SE, tokoh utama pendiri SOKSI yang sejak berdiri 1960 sampai 1986 memimpin Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) dan sampai saat ini menjabat Ketua Dewan Penasihat, dalam Sejarah kelahiran SOKSI, ada beberapa momentum yang memiliki nilai sangat tinggi, dan sangat menentukan langkah dan strategi perjuangan organisasi.

Dimulai momentum kehidupan politik di tanah air setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 1955 – Pemilu yang pertama kali dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Khususnya pada situasi periode 1957 sampai 1965 sangat tidak menguntungkan bagi struktural politik, sosial, budaya dan perekonomian Bangsa Indonesia. Berbagai gejolak sosial politik yang bersifat kedaerahan seperti PRRI dan PERMESTA, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses mencari bentuk sistem kehidupan politik, sosial, budaya, dan perekonomian bangsa.

Berbagai keputusan politik yang sangat startegis telah pula dikeluarkan oleh pemerintah Bung Karno pada 1957 sampai 1959, antara lain: Perjuangan pembebasan



SUHARDIMAN, PEMOTRETAN DI KEDIAMANNYA ■ mti/wilson

Irian Barat; Pembatalan Konfrensi Meja Bundar; Ambil alih (nasionalisasi) perusahaan-perusahaan milik Belanda; dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959; Konstituante dibubarkan dan Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sebagai landasan konstistusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik liberal ditinggalkan, dan dimulai sistem politik yang dikenal dengan Demokrasi Terpimpin.

Kemudian, pada 1957, Badan Nasionalisasi (Banas) dibentuk untuk melaksanakan ambil-alih atau nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, dengan Ketua Harian D Suprayogi (Mayjen), dan Suhardiman (Kapten TNI-AD) sebagai sekretaris.

Sebagai Sekretaris Banas, Suhardiman berbekalkan naluri kejuangan dan keyakinan yang kuat serta dari pengamatan, mempelajari dan mengkaji permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia selama tiga tahun (1957-1960), maka dari Ide Dasar Manusia Karya sebagai perwujudan dari manusia Indonesia baru disampaikan kepada Ketua Harian Banas, dan sekaligus mengusulkan agar dibentuk Persatuan Karyawan Perusahaan Negara (PKPN). Konsep ini diyakini akan mampu mengimbangi dan menandingi PKI serta seluruh jajarannya.

Tanggal 20 Mei 1960, Ketua Harian Banas

menyampaikan ide dasar tentang karyawan, atau Manusia Karya Swadiri (Karyawan Swadiri) yang diusulkan oleh Suhardiman tersebut pada sidang kabinet. Sekaligus dilakukan persiapan pembentukan organisasi PKPN yang kemudian diperingati sebagai hari kelahiran SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia).

Kehadiran organisasi PKPN dengan cepat menyebar ke perusahaan-perusahaan negara di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sekaligus telah menggelisahkan PKI karena mengancam keberadaannya. PKI melakukan protes melalui berbagai media-masa atas kehadiran PKPN.

Untuk menindaklanjuti perkembangan PKPN, maka pada pertengahan 1961 diadakan rapat pleno seluruh pimpinan PKPN, dan menghasilkan keputusan untuk mendirikan Badan Koordinasi Pusat Persatuan Karyawan Perusahaan Negara (BKP-PKPN), dengan Ketua Umum Suhardiman dan Sekretaris Jenderal Adolf Rachman.

Kemudian, 21 September 1962, Musyawarah Kerja Nasional I BKP-PKPN yang diselenggarakan di Palembang, khususnya komisi organisasi tidak berhasil memutuskan apa nama yang tepat bagi organisasi ke depan, karena nama BKP-PKPN dianggap tidak mencerminkan ciri, dan misi yang jelas. Sebagai Ketua Umum



SUHARDIMAN, PENDIRI SOKSI ■ mti/wilson

BKP-PKPN, Suhardiman mengusulkan nama SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia). Mukernas I BKP-PKPN menerima usul tersebut, dan bersepakat nama BKP-PKPN diganti menjadi SOKSI sebagai nama sekaligus jati diri bagi perjuangan karyawan Indonesia.

Kata sosialis mengandung pengertian Sosialisme Pancasila yang bercirikan manusia karya yang mandiri dan sejahtera.

Bulan berikutnya, tepatnya 17-22 Desember 1962, Musyawarah Besar (Mubes) I BKP-PKPN, atau disebut juga sebagai MUBES I SOKSI di Gelora Bung Karno, Jakarta, menghasilkan legitimasi bagi keberadaan organisasi SOKSI secara nasional. Amanat Presiden Soekarno pada Mubes I SOKSI itu secara politis benar-benar telah memberikan arti khusus dan legalitas bagi keberadaan BKP-PKPN sebagai embrio SOKSI secara nasional.

Musyawarah Besar I BKP-PKPN, itu menetapkan keputusan strategis: (1) Penetapan Nama Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI), sebagai pengganti Badan Koordinasi Pusat Persatuan Karyawan Perusahaan Negara (BKPPKPN); (2) Restu Bung Karno terhadap keberadaan dan misi SOKSI; (3) Strategi Bung Karno terhadap keberadaan dan misi SOKSI; (4). Memilih dan menetapkan Suhardiman sebagai Ketua Umum dan sekaligus Kuasa Penuh Nasional (Kupenas) SOKSI; (5) Perluasan basis SOKSI yang

menjangkau seluruh sektor kehidupan di seluruh wilayah Indonesia, yakni pemuda, pelajar, mahasiswa, cendekiawan, buruh, tani, wanita dan seterusnya.

Sejak 1962 tersebut, berbagai organisasi sayap dibentuk pula oleh SOKSI dengan mengambil nama "kontra" underbownya PKI seperti LEKRI vs LEKRA, GERWASI vs GERWANI, RTI vs BTI, PELMASI, dstnya.

Kemudian, 23 Maret 1963, dilahirkan Doktrin Perjuangan SOKSI yaitu, Karyawanisme sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya dalam melaksanakan perjuangan SOKSI. Semula disebut Manifesto Karyawan, dan pada 1968 menjadi Doktrin Karyawanisme.

SOKSI bukan lahir sebagai organisasi kekuatan sosial politik, tetapi sebagai organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada karya dan kekarya. Sebagai organisasi perjuangan dan gerakan yang memiliki wawasan ideologi, dan misi politik berupa Lima Komitmen Strategis.

Komitmen-komitmen tersebut adalah bersifat abadi, dan senantiasa melahirkan ide, fikiran, gagasan dan konsep baru demi terwujudnya pemahaman terhadap pola dan sistem kehidupan masyarakat, bangsa dan negara di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Arah dan tujuannya adalah Masyarakat Sosialis Pancasila, atau masyarakat sejahtera lahiriyah dan bathiniyah.

Inilah hakekat jati diri SOKSI yang tak pernah tergoyahkan oleh rintangan dan tantangan yang menghadang. Bahwa dengan Ide Dasar Manusia Karya Swadiri, dan jati diri SOKSI inilah yang mewarnai Doktrin Perjuangan Karyawanisme sebagai pengaman dan pengamalan Pancasila. Bahwa sejak awal kelahirannya di tahun 60-an, SOKSI telah berjuang habis-habisan melawan Partai Komunis Indonesia dengan ideologi komunisnya sampai terkuburnya Partai Komunis Indonesia setelah pemberontakan G 30 S/PKI, gagal tahun 1965. Meskipun Partai Komunis Indonesia dengan mantel-mantel organisasinya telah dibubarkan dan ajaran komunis (Marxisme-Leninisme) dilarang, namun SOKSI senantiasa tetap waspada terhadap bahaya laten sisa-sisa G 30 S/PKI.

SOKSI merupakan salah satu organisasi cikal bakal yang turut membidani kelahiran Golongan Karya (Golkar) pada 1964, dan terus memberikan dukungannya untuk perkembangan dan pertumbuhan Golkar sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang semakin mandiri, dan berakar di tengah-tengah masyarakat. □ mti/tsl

Dinamika



a Perjuangan SOKSI



SUHARDIMAN, HAPPY BIRTHDAY
16 DESEMBER ■ mti/dok

Tahun 1960-1963 merupakan tahun pengembangan organisasi. Fase ini adalah fase untuk memperluas sayap organisasi dan menanamkan pengertian kepada masyarakat mengenai “sanksi paran”nya SOKSI. Tahun 1963-1964 merupakan tahun konsolidasi dan kristalisasi SOKSI guna menempa kekuatan dan kesatuan massa pendukung SOKSI.

Tahun 1964-1965 merupakan tahun “action”. Fase ini merupakan pengalaman dan pelaksanaan tugas-tugas perjuangan. Dalam tahun-tahun ini SOKSI mengalami tugas-tugas berat, karena pada tahun 1964 SOKSI membidani kelahiran Golongan Karya (Golkar), dan pada saat yang sama pula SOKSI harus membendung secara ofensif politik dari PKI.

Pada tahun 1965 SOKSI secara total berperan aktif bersama kekuatan yang setia kepada Pancasila menumpas pemberontakan G 30 S/PKI. Pada Juli 1965, JM Menteri/ Panglima Angkatan Darat Letnan Djenderal Achmad Yani, menyetujui dan merestui pengintegrasian perjuangan SOKSI dengan Doktrin TNI AD Tri Ubaya Cakti, atau lebih dikenal dengan Soksi Manunggal Dengan Tri Ubaya Cakti.

Tahun 1966-1969 merupakan tahun perjuangan menegakkan Orde Baru, dan meletakkan landasan untuk pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Tahun 1970-an merupakan tahun perjuangan untuk rekonsolidasi organisasi SOKSI memasuki tantangan baru yang dihadapinya. Pada tahun 1971 SOKSI memusatkan perhatian untuk memenangkan Golkar dalam Pemilu yang pertama kalinya dilaksanakan pada masa Orde Baru.

Tahun 1973, merupakan tahun “pengembangan” bagi SOKSI. Pada fase ini telah lahir struktur politik baru, yaitu dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1973 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Dalam Undang-Undang tersebut diletakkan dasar-dasar keanggotaan Partai Politik dan Golkar yang bersifat perorangan. Menghadapi keadaan ini SOKSI menyerahkan kader-kadernya kepada Golkar, dan SOKSI memilih “mengembara”, atau memilih jalan baru.

Tahun 1973 -1978, merupakan tahun pengembangan SOKSI, dan pada pertengahan tahun 1978 SOKSI mulai bangkit kembali dengan melaksanakan kaderisasi SOKSI melalui organisasi sayap Wira Karya Indonesia.

Tahun 1980-an, merupakan tahun-tahun “kebangkitan kembali” SOKSI. SOKSI GUGAH, SOKSI TRIWIKRAMA, di mana masa-masa sulit telah mampu diatasi SOKSI.

Ada 3 faktor kekuatan yang mendorong SOKSI untuk bangkit, yaitu:

(1). SOKSI senantiasa mengembangkan daya kreativitas, bersikap inovatif sesuai dengan *raising remand*;

(2). SOKSI memiliki integrasi faktor berupa Doktrin Karyawanisme; dan

(3). SOKSI memiliki “Courage”, atau keberanian untuk menghadapi kenyataan, dan tantangan-tantangan perjuangan.

Pada fase ini SOKSI melakukan gerakan kaderisasi secara Nasional yang dikenal dengan Kader Bangsa.

Tahun 1985, merupakan tahun lahirnya 5 (lima) Undang-undang di bidang politik. Undang-Undang ini mempertegas kembali posisi partai-partai politik, dan organisasi kemasyarakatan menitik beratkan gerak juangnya pada bidang sosial kemasyarakatan, dan bidang ekonomi. □ mti/

tsl

Paham Organisasi

Kelahiran SOKSI dari goagarba ibu pertiwi pada tahun 1960 merupakan panggilan dan tuntunan sejarah. Ketika Pancasila dan UUD 1945 mengalami tantangan dan rongrongan dari ekstrim kanan dan Partai Komunis Indonesia, SOKSI tampil sebagai benteng dan pembela yang berdiri di garda depan. Dengan mendirikan berbagai lembaga konsentrasi, SOKSI memosisikan diri 'vis a vis' Partai Komunis Indonesia beserta segenap organisasi mantelnya. Berbagai organisasi tandingan didirikan antara lain SOKSI untuk mengkonter SOBSI. P3I untuk mengkonter Pemuda Rakyat, Pelmasi untuk mengkonter CGMI, Gerwasi mengkonter Gerwani, RTI mengkonter BTI, dan seterusnya.

Setelah bangsa Indonesia memasuki Orde Baru maka tugas dan tanggung jawab SOKSI adalah meneruskan perjuangan agar Pancasila tidak hanya berada pada tataran landasan falsafah dan pegangan hidup bangsa, tetapi mampu mewujudkan 'in concreto' dalam kehidupan nyata masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, sebagaimana awal kelahiran SOKSI senantiasa menyandarkan perjuangannya pada doktrin karyawanisme, yaitu doktrin yang senantiasa memahami keberadaan manusia yang tridimensional (insan Tuhan, insan sosial, dan insan pribadi) secara utuh/holistik/integratif, dalam alam raya semesta untuk mewujudkan (berkarya bagi) kesejahteraan lahir-bathin berupa pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan fisik, pekerjaan, pendidikan, komunikasi, kehidupan beragama dan pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, secara serasi, selaras dan seimbang.

Dalam era reformasi yang sedang berlangsung, SOKSI sebagai organisasi kemasyarakatan yang bersifat swadiri dan bergerak di segala bidang dan tetap beryakinan bahwa doktrin karyawanisme sebagai pengamalan Pancasila akan mampu mewujudkan masyarakat marya yaitu masyarakat yang beramal, berbakti dan berdharma kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada sesama dan diri sendiri melalui kekeryaan baik rohaniyah dan bathiniyah maupun jasmaniah untuk meningkatkan kesempurnaan hidup dan martabat manusia; menempuh jalan musyawarah untuk mufakat dalam kekeryaan dan dalam memecahkan masalah, serta berusaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Tuntutan panggilan sejarah dan orientasi perjuangan SOKSI yang demikianlah yang menjadi 'jati diri' SOKSI dahulu, sekarang dan masa mendatang. Yaitu Pancasila, UUD 1945, dan doktrin karyawanisme sebagai landasan dan panduan orientasi pengabdian serta kejuangan SOKSI.

Dewan Penasihat SOKSI

Masa Bhakti 2005 -2010

■ Ketua:

Prof Dr H Suhardiman, SE

■ Ketua Harian:

Oetojo Oesman, SH

■ Wakil Ketua: SH Sri Sultan HB X * Drs Cosmas Batubara * Wiranto, SH, SIp * Ir Aburizal Bakrie * Dr Arnold Baramuli (alm) * Prof Dr Soleh Solahuddin * Moeryati Soedibyo * Dr Frizt Eman * Sri Redjeki Soemaryoto, SH

■ Sekretaris: Suhardi, SH

■ Wakil Sekretaris: Drs Rivai Siata * Dra Ria Rumata Aritonang ■ Anggota: Prof Dr Rahadi Ramelan * Nikentari Musdiono * Mulia Tarigan (Alm) * AA Oka Mahendra, SH * Abdullah Zainie, SH * Yoseano Waas * Didik Chadidjah Hasan * Drs Jimmy Budi Haryanto * Prof Dr Gunawan Sumodiningrat * Prof Dr Ishak Pulukadang * Ir Tadjuddin Nor Said * Syarif Cicip Sutarjo * John Simamora * Dr Albert Hasibuan * Drs Hatta Mustafa * Ir Mustahid Astari * Rusdi Taher, SH * Widjanarko Puspyo, MA * Piet Tallo, SH * Adolf J Sondakh * Ponulele * Hudarni Rani * Rusli Zainal * Jap Salosa * Ali Mazi, SH * Memed Laatuconsina * Drs Sunarjo * Dr Ritola Tasmaya, MPH, Msc * Ir Nanang Sutadji * Ir Uumbu Meheng Kunda * Ir Indra Bambang Utoyo * Bambang Sungkono, MA * Yustina Sri Kadarningsih * Oetarti Swasono, SH * Prof Daniel Kumarga, SH * Drs Syarif Said Alkadrie * Ir Danny Sudarsono * Abbas Sahib * Drs Baharuddin Aritonang * Oke Fredy Supit * Drs Datuk Labuan * Asep Ruchimad Sudjana * Drs Razian Agus Toniman * Anton Pryatno, SH * Ibrahim Gaos, SH * Edward Hutabarat * Ch M Muas * Jimmy Jambak, SE * Drs Yohanes Tetelepta * Drs Muzayyim Mahbub * Machfudz Djaelani * Drs John Pasaribu, Msi * Dr Saparuddin Puo (Alm)

Asas, Tujuan dan Tugas SOKSI

■ Asas:

SOKSI berasaskan Pancasila

■ Tujuan:

SOKSI dalam melaksanakan perjuangan berorientasi pada karya dan kekeryaan, bertujuan:

- Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- Mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- Mengembangkan sistem kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan huku;
- Meningkatkan kualitas manusia Indonesia sebagai manusia Pacasila;
- Menegakkan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- Meningkatkan pengabdian bagi masyarakat melalui karya dan kekeryaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan lahir dan batin.

■ Tugas SOKSI adalah:

- Meningkatkan penghayatan, pengamalan dan pembudayaan Pancasila sebagai ideologi nasional dan satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mendorong dan meningkatkan peranserta anggota dan masyarakat pada umumnya dalam menyukkseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
- Meningkatkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi anggota dan masyarakat pada umumnya.
- Mendidik, melatih dan membimbing para anggota dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan integritas dan kualitas diri serta kualitas karya dan kekeryaan.
- Meningkatkan pelaksanaan karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
- Mendirikan dan membina wadah pengabdian masyarakat sebagai sarana bagi anggota atau masyarakat pada umumnya, menyalurkan karya serta dharma baktinya sesuai dengan dan kemampuan masing-masing.

Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI

Masa Bhakti 2005-2010

■ **Ketua Umum:**

Syamsul Mu'arif

■ **Wakil Ketua Umum:**

Prof Dr Thomas Suyatno

■ **Ketua Bid. Ekonomi & Keuangan:** Dr Ir H Lili Asdjuredja ■

Ketua Bid. Hutan & Lingk. Hidup: KGPH Joyokusumo ■ **Ketua Bid.**

OKK: Ir Ali Wongso H Sinaga ■ **Ketua Bid. Hukum & HAM:**

Lawrence TP Siburian, SH, MH ■ **Ketua Bid. SI & IS & Pera:** Drs.

Hardisusilo ■ **Ketua Bid. Industri & Perdagangan:** Ir T

Suriansyah, MSc ■ **Ketua Bid. Ketenagakerjaan:** Drs Serta

Ginting ■ **Ketua Bid. Pengabdian Masyarakat:** Drs Firman

Subagyo ■ **Ketua Bid. Pertanian & Perkebunan:** Ir Awal Kusumah

■ **Ketua Bid. Seni Budaya & Pariwisata:** Endang Agustina

Syarwan Hamid ■ **Ketua Bid. Perikanan & Kelautan:** Ir SM

Tampubolon ■ **Ketua Bid. Energi & SD Mineral:** Ir Ahmad Noor

Supit, MBA ■ **Ketua Bid. Wira usaha & Koperasi:** Drs Malkan

Amin ■ **Ketua Bid. Cendekiawan & Litbang:** Drs Ade Komaruddin

■ **Ketua Bid. Mahasiswa & Pelajar:** Dewi Asmara, SH ■ **Ketua**

Bid. Pemuda & Olahraga: Jack M Napitupulu ■ **Ketua Bid.**

Pemberdayaan Perempuan: Dra Ambar Yuniarti ■ **Ketua Bid.**

Hublu & Hankam: Drs Sukoco Said ■ **Ketua Bid. Kerohanian:**

Nafsiah Umar Salim ■ **Ketua Bid. Pendidikan:** Hardjianto Tohari

MA ■ **Ketua Bid. Kependudukan & Trans:** Drs Patrice Morin

■ **Sekretaris Jenderal:**

Drs FMT Radjaguguk

■ **Wakil Sekretaris Jenderal:** Dra Endang Prihatini, MSi * Drs

Mathias Tambing * Emir Baramuli, MBA * Langlang Wilangkoro

(Ongko) * Capt. Anton Sihombing * Rasyidi Darmawan * Saud

L Tobing * Fatomy Ashari, SH, MSi * Drs Djoko Purwogemboro

* Drs Erwin Ricardo Silalahi * Syarifuddin Sinaga, SH * Dra Kiki

Ungaro * Drs Manggaradja Hutauruk * Rahman Akil, MA * Drs

Valentino Barus * Anshori Sinungan, SH, LLM * Dra Efi Rusfian,

MSi * Ir Max Tehusalawany * K Sius Pahur * dr Charles

Mesang * Drs Imam Addaruqutni, MA

■ **Bendahara Umum:**

Bobby Suhardiman

■ **Wakil Bendahara Umum:**

Rudy S Sanyoto, SE

■ **Bendahara:** Dr. Markum Singodimedjo * Ir Suharsoyo * Ir

Yohanes W Nurwono * Dr Amri Siregar * Drs Reza Kamarullah

* Drs Hamka Yandu * Drs Syukur Sarto * Yetni Murni, SH * Ir

Moh Harry Jaya Pahlawan, GKN * Rachmad Taher, MBA * Rae

Sita Supit, MA * Drs Yacob Purwanto * Dra Eva Tarigan * Dra

Maya Lucyda * Drs Setiawan Sebayang * Drs Sujudi

■ **Departemen-Departemen**

■ **Departemen Organisasi Kaderisasi Keanggotaan:** ♦

Koordinator: Syukur Achmad ♦ Sekretaris: Drs R Hadymartono

♦ Anggota: Drs Syarifuddin Sabang * Drs Otto Talahattu * Drs

Imam Djuwani * Bella Saphira, SE * Drs Victus Murin * Helman

H Simandjuntak * Evi Latifah, SH ■ **Departemen Ekonomi &**

Keuangan: ♦ Koordinator: Budi Ruseno, MBA ♦ Sekretaris:

Kirwan Soni Harsono ♦ Anggota: Hotman Hutabarat, SE *
Arisetianto Nugroho, SE * Drs Azhar Muchlis * Roberto

Hutapea, SE * Drs Ranendra Dangin, Msc ■ **Dep Industri &**

Perdagangan: ♦ Koordinator: Ir Eko Budi Santoso ♦ Sekretaris:

Dra Farida Efendi ♦ Anggota: Ir Dipa Malik * Bambang Samuel,

SH * Drs Eka Nusa * Hamzah Kosasih * Mustafa Kemal, SH ■

Dep Energi & Sumber Daya Mineral: ♦ Koordinator: Ir Husni

Thamrin ♦ Sekretaris: Ir Casper Edo Sitta ♦ Anggota: Drs Indro

Hananto * Dondry Candra Kusuma, MBA * Ir Daniel PJ

Hutabarat * Kara Mustafa, SH * Hidayat Jahya, SE ■ **Dep**

■ **Ketenagakerjaan:** * Koordinator: Reyna Usman, MBA *
Sekretaris: Drs Halomoan Hutapea * Anggota: Fien Waas ♦

Achmad Mundji ♦ Dra Anie Simanjunak ♦ Rambun Sumardi, SE,

MSi ♦ Bahder Napitupulu, SE, MBA ♦ Johnie Prianto, SE ■ **Dep**

Wirausaha & Koperasi: ♦ Koordinator: Fatahillah, SE ♦

Sekretaris: Ir T Putut Dariadi, MSc ♦ Anggota: Abdul Azis, SE *
Slamet Pramono, SE * Ir Muzakir Ridha * Dra. Winora Siregar *

Abdullah Pala, SE * Supriadi Syarif ■ **Dep Pertanian &**

Perkebunan: ♦ Koordinator: Ir Harris Ali Murfi, MSi ♦

Sekretaris: Dra Antarini Malik ♦ Anggota: Ir Irfan Syahrial * Ir

Luvie Triadi * Ir Muzakir Ridha * Victor Aritonang * Basuki ■

Dep Perikanan & Kelautan: ♦ Koordinator: Drs Leo Tomaso

♦ Sekretaris: ♦ Hotman Naiborhu, SE ♦ Anggota: Drs Yosef

Naisoi * MF Horrison, SH * Chandra Dewi, SE ■ **Dep Hutan &**

Lingkungan Hidup: ♦ Koordinator: Drs Mahredje Wahab

♦ Sekretaris: Drg Sri Hariningsih ♦ Anggota: Heru Purnomo, SH * Ir

Hot Asi Simamora * Ir Iswan Abdulrahman, MM * Drs R Yoga

Kumala, Dipl PR ■ **Dep Sistem Informasi & Infrastruktur. &**

Perumahan Rakyat: ♦ Koordinator: Ir Boyke Muhammad

♦ Sekretaris: Ir Budi Nasution ♦ Anggota: Achmad Yani Siata, ST *
Ir Raldi Doy * Erwan Maluyu * Yuniarto ■ **Dep Pendidikan:** ♦

Koordinator: YR Dandono, MBA ♦ Sekretaris: Lasti Handini, Msc

♦ Anggota: Arus Silondae, SH, LLM * Sunarto, SE, MM * Drs

Darsono, MSi * Drs Marihot Simorangkir, MSc * Dr Ir Franky

Teupere MP ■ **Dep Pengabdian Masyarakat:** ♦ Koordinator: dr

Hernalom Gultom ♦ Sekretaris: dr Betwen Luthan ♦ Anggota:

Dra Ani Maulani Singih * Nindy Eleesy Laoh * dr Rony Rifanie *

Hj Peggy Draupady Wachjo * dr Elzarida Arbain, MK * dr

Mangantar Marpaung ■ **Dep Seni Budaya & Pariwisata:** ♦

Koordinator: Diana Nasution ♦ Sekretaris: Vivi Efendi ♦ Anggota:

Vina Panduwinata * Drs Dewa Rai Budiasa * Connie Nurlita *

Lina Efendi

Joseph Hutabarat * Jen Retno * Raymond Pardede, SH ■ **Dep**

Kependudukan & Transmigrasi: ♦ Koordinator: Dra Sri Hartini

♦ Sekretaris: Drs Lutsar Lumbanraja, SH, MSi ♦ Anggota: Drs

Normansyah Sophan * Suli Suwarni, SH, MH * Drs Admiral

Faisal * Rony Wawungan * Drs Mahmud K Sinaga ■ **Dep**

Hukum & Ham: ♦ Koordinator: Tisnaya Kartakusumah, SH ♦

Sekretaris: Domoli Simanjuntak, SH ♦ Anggota: Victor Nadapdap,

SH, MBA, MM * Ferry Juan, SH * Ronald Simanjuntak, SH * Rini

Kamaluddin, SH * MF Harrison, SH * Gousta Feriza, SH, MH * J.

Kamaru, SH * Jahifni Y Ishak, SH, MSc ■ **Dep Kerohanian:** ♦

Koordinator: KH Maktub Efendi ♦ Sekretaris: Drs SMS Sadana,

MSi ♦ Anggota: Ir Efendi Hutahayan * Hj Arofah Nizarwan * Drs

Nyoman Dharma Setiawan * Andi Asmara, SH * Drs M

Radjaguguk ■ **Dep Pemuda & Olahraga:** ♦ Koordinator: Drs.

Rushadi, MSi ♦ Sekretaris: Syaikul Azhar ♦ Anggota: Bachtir R

Ujung * Boy Kaligis * Steve Wawulangi * Soraya Sultan, SH *
Drs JB Achmad Puhar, SSos * Ferry Tanto ■ **Dep Mahasiswa**

& Pelajar: ♦ Koordinator: David Situmorang, SE, MSi ♦

Sekretaris: Drs Nico Silitonga, MM ♦ Anggota: Dedi Arianto *

Agung Giantoro * Suharyono * Junianto Simanjuntak * Ir

Nefonata Sembiring ■ **Dep Pemberdayaan Perempuan:** ♦

Koordinator: Tyas Indah, SH, MKA ♦ Sekretaris: Taty Abdi ♦

Anggota: Dra Dewi Permatasari * Debby Amelia * Dra Sri

Suhartini * Mulat Hapsari, MArch * Ir Rini Siregar * Nung

widaningsih Frans * Erna Tahang ■ **Dep Cendekiawan &**

Litbang: ♦ Koordinator: Dr Reny Hawadi ♦ Sekretaris: Dr

Syamsudin Manan, SH, MH ♦ Anggota: Prof Suryanto * Ir

Prasetyo Sunaryo, MT * Zulfikar Lukman, MBA * Ani Suryani,

MA * Sidi Mawardi, SS, MSi ■ **Dep Hubungan Ln & Hankam:**

♦ Koordinator: Wendy Nugraha Tuswandi ♦ Sekretaris: Drs FO

Era Era Harefa ♦ Anggota: Drs Henry Gultom, MPP * Tjandra

Mulia, SH * Eddy Susilo, SE

Dewan Pimpinan Daerah (DEPIDAR) SOKSI

■ Depidar I SOKSI NAD Depidar II SOKSI Sumatera Utara ■ Depidar III SOKSI Sumatera Barat ■ Depidar IV SOKSI Riau ■ Depidar V SOKSI Jambi ■ Depidar VI SOKSI Sumatera Selatan ■ Depidar VII SOKSI Lampung ■ Depidar VIII SOKSI DKI Jakarta ■ Depidar IX SOKSI Jawa Barat ■ Depidar X SOKSI Jawa Tengah ■ Depidar XI DI Yogyakarta ■ Depidar XII SOKSI Jawa Timur ■ Depidar XIII SOKSI Kalimantan Timur ■ Depidar XIV SOKSI Kalimantan Selatan ■ Depidar XI SOKSI Kalimantan Tengah ■ Depidar XVI SOKSI Kalimantan Barat ■ Depidar XVII SOKSI Sulawesi Utara ■ Depidar XVIII SOKSI Sulawesi Tengah ■ Depidar XIX SOKSI Sulawesi Selatan ■ Depidar XX SOKSI Sulawesi Tenggara ■ Depidar XXI SOKSI Bali ■ Depidar XXII SOKSI NTB ■ Depidar XXIII SOKSI NTT ■ Depidar XXIV SOKSI Maluku ■ Depidar XXV SOKSI Papua ■ Depidar XXVI SOKSI Bengkulu ■ Depidar XXVII SOKSI Bangka Belitung ■ Depidar XXVIII SOKSI Banten ■ Depidar XXIX SOKSI Maluku Utara ■ Depidar XXX SOKSI ■ Depidar XXXI SOKSI Irian Jaya Barat ■ Depidar XXXII SOKSI Kepulauan Riau ■ Depidar XXXIII SOKSI Sulawesi Barat

MARS KARYAWAN INDONESIA

Lagu : Kartono
Kata-Kata : Audaly & Suhardiman
Aransemen: Thomas Suyatno

Karyawan-karyawan indonesia
Potensi karya yang menentukan
Berhasilnya cita-cita
Proklamasi empat lima

Reff.
Sebagai pengabd pada tuhan dan umatnya
Berdharma berbhakti beramal berkarya
Dengan jujur ikhlas tanpa pamrih
Marilah membangun mencipta yang baru
Mencapai Indonesia jaya
Berlandaskan azas pancasila
Undang-undang dasar empat lima
Berjuang serta berkorban
Untuk rakyat bangsa negara
Pengemban amanat penderitaan rakyat
Segera buktikan segera wujudkan
Masyarakat adil dan makmur
Pancangkan kibarkan sangsangka dwiwarna
Mencapai indonesia raya

Panca Dharma Karyawan

- Kami karyawan indonesia, adalah patriot yang bersemangat proklamasi 17 agustus 1945, berjiwa pancasila setia dan taat pada undang-undang dasar 1945.
- Kami karyawan indonesia, adalah pejuang pelaksana amanat penderitaan rakyat dalam membangun masyarakat karya yaitu masyarakat sejahtera sebagai pengamalan pancasila
- Kami karyawan indonesia, adalah pelopor pembangunan semesta yang mengutamakan kerja keras, tangkas, cakap, sederhana dan jujur.
- Kami karyawan indonesia, adalah kesatria yang berwatak setia kawan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Kami karyawan indonesia, adalah kader bangsa yang menjunjung tinggi etika profesionalisme.

Pimpinan dan Staf TokohINDONESIA DotCom

Mengucapkan
Selamat Hari Ulang Tahun
ke

82

Sabtu, 16 Desember 2006

Kepada

Bapak Prof Dr Suhardiman, SE

Pendiri Satu-satunya
dan
Ketua Dewan Penasihat
SOKSI

Semoga Panjang Umur, Sukses dan Sehat Selalu
Atas Ridho Tuhan Yang Maha Esa

Jakarta, 16 Desember 2006

Ch Robin Simanullang
Pemimpin Umum

Keluarga Besar

SOKSI

(Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia)

Mengucapkan
Selamat Hari Ulang Tahun

ke

82

Sabtu, 16 Desember 2006

Kepada

Bapak Prof Dr H Suhardiman, SE

Pendiri

dan

Ketua Dewan Penasihat
SOKSI

Semoga Panjang Umur, Sukses dan Sehat Selalu
Atas Ridho Tuhan Yang Maha Esa

Jakarta, 16 Desember 2006

Dewan Pimpinan Nasional
(Depinas) SOKSI

Syamsul Mu'arif

Ketua Umum

FMT Radjagukguk

Sekretaris Jenderal

Our Services:

PHOTO digital photo indoor • digital photo outdoor • digital video shooting • kiddy photo • glamour photo • graduation photo • family photo • candid photo • **BRIDAL** wedding package • wedding gown design • party gown design • **SALON** brides make up • party make up • kebaya



www.ricky-l.com • email:info@ricky-l.com